ENEWSLETTER
PKSPARLEMEN
KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF
Edisi Maret II Tahun 2021 No. 10

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Rakernas PKS 2021, Gen PKS adalah Pelayanan

Parlemen Garda Terdepan Melayani Rakyat

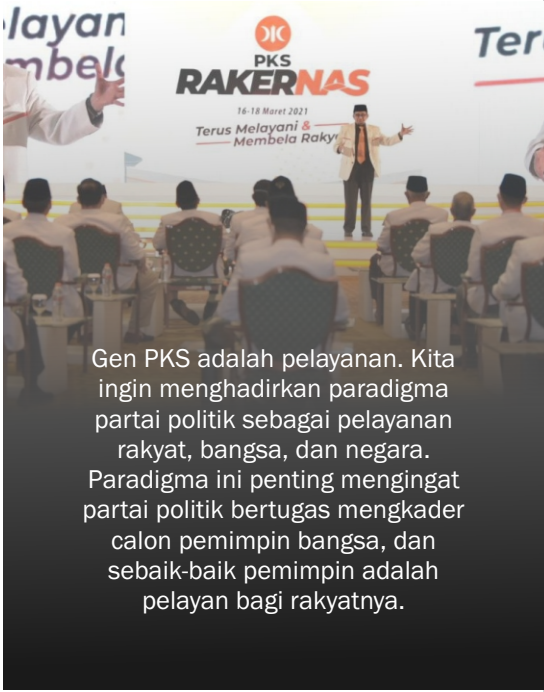

Gen PKS adalah pelayanan. Kita ingin menghadirkan paradigma partai politik sebagai pelayanan rakyat, bangsa, dan negara. Paradigma ini penting mengingat partai politik bertugas mengkader calon pemimpin bangsa, dan sebaik-baik pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya.

Alhamdulillah Rakernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah berlangsung maraton sejak tanggal 1 sampai dengan 16 Maret. Puncaknya pada tanggal 16-18 Maret di bawah Arahan Ketua Majelis Syuro Habib Sa-lim Segaf Aljufri dan Pengurus DPP PKS yang baru dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi melakukan penandatanganan komitmen kinerja sebagai langkah awal realisasi program pada periode PKS 2020-2025 dalam melayani dan membela rakyat, Kamis (18/03/2021). Fraksi PKS menjadi bagian dari struktur tersebut, berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melak-sanakan keputusan Rakernas.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan PKS hadir di pentas politik nasional sejak awal mengabdikan diri untuk menjadi pelayanan rakyat, pembela kepentingan rakyat, penjaga identitas dan karakter bangsa, dan bersama-sama komponen bangsa lainnya mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Gen PKS adalah pelayanan. Kita ingin menghadirkan paradigma partai politik sebagai pelayanan rakyat, bangsa, dan negara. Paradigma ini penting mengingat partai politik bertugas mengkader calon pemimpin bangsa, dan sebaik-baik pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya.

Pentingnya partai politik mengokohkan demokrasi di Indonesia dengan kebijakan dan program aksi yang lebih konkrit, bukan lagi pada tema-tema demokrasi prosedural atau kesamaan kesempatan (equal opportunity). Tapi bagaimana partai berperan dalam mendorong keadilan di berbagai bidang, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat.

Inilah yang coba dihadirkan oleh PKS dalam Rakernas kali ini. Bagaimana mengelola demokrasi yang produktif dan berkorelasi positif dengan keadilan, kemajuan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk kesekian kali, Fraksi PKS siap menjadi garda terdepan dalam mengawal program kerja PKS untuk rakyat dalam forum perjuangan politik di parlemen.

Parlemen adalah salah satu kanal dalam sistem demokrasi. Kehadiran Anggota DPR sejatinya bukan hanya mewakili para pemilihnya, namun juga secara aktif mencermati kebijakan negara dari pusat hingga daerah. Dari yang teknis hingga strategis, sebuah political business process yang akan dipertanggungjawabkan kelak pada arena elektoral. Aleg bukan sekedar etalase partai, namun juga pejuang-pejuang yang harus memiliki napas panjang dan daya tahan terbaik.

Ditengah pemusaran politik yang semakin jenuh dan hiruk pikuk stagnasi kebijakan, Fraksi PKS senantiasa berikhtiar menciptakan sejumlah terobosan yang kreatif, atraktif dan subtantif. Sehingga pada akhirnya setiap kata mampu diartikulasikan menjadi advokasi terbaik, setiap daya menjadi pendorong perubahan dan menghadirkan program yang solutif untuk bangsa dan negara.

Meski Fraksi adalah etalase partai tentu itu bukan berarti tidak tersentuh dan berjarak. Ruang aspirasi setiap selasa dan jumat dibuat dalam upaya mendobrak alur aspirasi yang sangat birokratis, karena seringkali sulitnya rakyat bertemu wakilnya. Karena sejatinya para legislator hadir di parlemen menjadi "Penyambung Lidah Rakyat" yang mampu menangkap kegelisahan dengan cermat dan sensitif.

Mimbar demokrasi dihadirkan untuk menampung dan menyajikan perspektif yang jernih dari beragam pandangan sehingga semakin memperkuat nilai-nilai Demokrasi. Indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, mungkin agak sedikit keruh demokrasi saat ini. Kita ingin perspektif demokrasi di Indonesia ini menjadi jernih dan cerdas. kita ingin demokrasi dipahami secara benar. Indonesia sebagai negara demokrasi memang berbeda dengan negara barat, karena demokrasi kita adalah demokrasi pancasila dan demokrasi yang berketuhanan.

PKS

Selamat & Sukses

RAKERNAS

16-18 Maret 2021

Terus Melayani & Membela Rakyat

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI @fpksdprri PKS TV DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Jazuli Juwaini: Fraksi PKS Garda Terdepan dalam Melaksanakan Keputusan Rakernas

KUTIPAN

Jakarta (19/03) --- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menghadiri puncak acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera 16-18 Maret 2021 di Hotel Bidakara Jakarta

Rakernas ini dilaksanakan secara offline dengan peserta terbatas dan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Menurut Jazuli Rakernas PKS adalah momentum untuk menyatukan langkah dan mengokohkan pelayanan dan pembelaan PKS kepada rakyat. Dan, Fraksi PKS menjadi garda terdepan dalam melaksanakan seluruh keputusan Rakernas.

"Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS kami mengucapkan selamat Rakernas PKS. Dengan komitmen yang tinggi untuk terus mengokohkan pelayanan dan pembelaan kepada rakyat, Fraksi PKS dari pusat hingga daerah siap menjadi garda terdepan dalam melaksanakan seluruh keputusan Rakernas," tegas Jazuli.

Anggota Komisi I Dapil Banten ini menyatakan bahwa PKS hadir di pentas politik nasional sejak awal mengabdikan diri untuk menjadi pelayanan rakyat, pembela kepentingan rakyat, penjaga identitas dan karakter bangsa, dan bersama-sama komponen bangsa lainnya mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Gen PKS adalah pelayanan. Kita ingin menghadirkan paradigma partai politik sebagai pelayanan rakyat, bangsa, dan negara. Paradigma ini penting mengingat partai politik bertugas mengkader calon pemimpin bangsa, dan sebaik-baik pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya," tandasnya.

Ketua Fraksi PKS DPR ini juga menekankan pentingnya partai politik mengokohkan demokrasi di Indonesia dengan kebijakan dan program aksi yang lebih konkrit, bukan lagi pada tema-tema demokrasi prosedural atau kesamaan kesempatan (equal opportunity). Tapi bagaimana partai berperan dalam mendorong keadilan di berbagai bidang, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat.

"Inilah yang coba dihadirkan oleh PKS dalam Rakernas kali ini. Bagaimana mengelola demokrasi yang produktif dan berkorelasi positif dengan keadilan, kemajuan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat. Dan, Fraksi PKS siap menjadi garda depan dalam mengawal program kerja PKS untuk rakyat dalam forum perjuangan politik di parlemen," pungkas Jazuli.

Rakernas PKS ini berlangsung maraton sejak tanggal 1 sampai dengan 16 Maret dan puncaknya pada 16-18 Maret, di bawah Arahan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Aljufri dan DPP PKS yang baru dengan Presiden Ahmad Syaikhu dan Sekjen Aboe Bakar Al Habsyi.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Gen PKS adalah pelayanan. Kita ingin menghadirkan paradigma partai politik sebagai pelayanan rakyat, bangsa, dan negara. Paradigma ini penting mengingat partai politik bertugas mengkader calon pemimpin bangsa, dan sebaik-baik pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Presiden PKS Tegaskan Tolak Jabatan Presiden RI Tiga Periode

KUTIPAN

"Pembatasan jabatan Presiden RI dua periode juga untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan secara sehat. Rakyat harus diberikan pilihan calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia. PKS meyakini banyak para pemimpin dan tokoh bangsa yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas yang baik untuk memimpin Indonesia ke depan," lanjut Syaikhu.

Menurutnya, demokrasi akan semakin tidak sehat dan mundur ke belakang, serta menyalahi amanat konstitusi dan refor

"Dua periode sudah cukup untuk Presiden. Ini adalah amanat reformasi dan Konstitusi yang harus kita jaga. Wacana jabatan Presiden tiga periode tidak sesuai dengan fitrah demokrasi. Demokrasi kita akan semakin tidak sehat dan mundur ke belakang," tegas Syaikhu dalam Puncak Rapat Kerja Nasional PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/03).

Lebih lanjut, Syaikhu menjelaskan tiga alasan mendasar mengapa jabatan Presiden RI tiga periode harus ditolak.

"Pertama, pembatasan jabatan Presiden dua periode untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkepanjangan seperti pada masa Orde Baru dan Orde Lama yang dapat merugikan rakyat Indonesia," jelas Syaikhu.

Kedua, Syaikhu menyatakan alasan penolakan jabatan Presiden RI tiga periode agar kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan sehat.

"Pembatasan jabatan Presiden RI dua periode juga untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan secara sehat. Rakyat harus diberikan pilihan calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia. PKS meyakini banyak para pemimpin dan tokoh bangsa yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas yang baik untuk memimpin Indonesia ke depan," lanjut Syaikhu.

Terakhir, Syaikhu menilai alasan penolakan Presiden RI tiga periode adalah demi kematangan demokrasi Indonesia.

"Penolakan ini juga demi memastikan fitrah demokrasi kita semakin matang. Demokrasi yang ditopang pada sistem nilai, budaya, dan kepemimpinan kolektif, bukan disandarkan pada figuritas semata. Ini yang akan membuat demokrasi kita naik kelas menjadi demokrasi substansial," pungkas Syaikhu.

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

"Penolakan ini juga demi memastikan fitrah demokrasi kita semakin matang. Demokrasi yang ditopang pada sistem nilai, budaya, dan kepemimpinan kolektif, bukan disandarkan pada figuritas semata. Ini yang akan membuat demokrasi kita naik kelas menjadi demokrasi substansial,"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kokohkan Pelayanan dan Pembelaan Rakyat,

PKS Gelar Puncak Rakernas 2021

KUTIPAN

Jakarta (16/03) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021, Selasa-Kamis, (16-18/03/2021).

"Hari ini PKS mulai menggelar acara puncak Rapat Kerja Nasional 2021 di Jakarta (16/3). Sejatinya rangkaian acara ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Maret 2021 yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara daring. ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboebakar Al-Habsy.

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menambahkan, puncak acara dilaksanakan secra hybrid, yaitu peserta dalam jumlah terbatas menghadiri secara fisik sedangkan peserta yang lain hadir secara virtual.

"Kehadiran secara fisik ini dilakukan dengan menerapkan protokol yang sangat ketat, yaitu peserta harus melakukan test PCR Swab ketika datang ke lokas. Setelahnya, peserta tidak boleh kemana-mana harus melakukan karantina sambil menunggu hasil test keluar. Setelah peserta dinyatakan negative Covid-19 oleh tim medis, maka mereka akad dapat gelang khusus untuk dapat masuk ke ruang acara", jelas Habib Aboe.

Tidak hanya itu, lanjut Aboe, selama acara para peserta dilarang keluar lokasi kegiatan. Hal ini untuk menjaga protokol agar diterapkan dengan baik. Selain itu, para peserta juga dilarang menerima tamu.

"Jadi semua peserta dibatasi pergerakannya untuk memberikan jaminan Kesehatan," ungkapnya.

Untuk mengurangi kejenuhan, imbuhnya, di area Rakernas disiapkan refreshment stage. Disitu peserta bisa bermain game, nongkrong ala di kafe, ataupun olah raga ringan. Ini untuk menjaga mood peserta agar tetap positif selama acara.

"Rakernas ini membahas mengenai renstra PKS selama lima tahun kedepan. Fokusnya adalan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu juga, kata Habib Aboe, konsolidasi dalam menguatkan advokasi kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Karenanya Rakernas PKS Kali ini mengambil tema 'Terus Melayani dan Membela Rakyat'.

"Berbagai strategi pelayanan dan advokasi untuk rakyat ini sudah dirumuskan dalam rapat-rapat online yang digelar sejak awal bulan. Saat puncak Rakernas ini akan dilakukan harmonisasi dan pengesahan hasil keputusan rapat tersebut. Insha Allah hasil rakernas ini akan semakin mengokohkan berbagai layanan yang diberikan PKS untuk masyarakat," tutup Habib Aboe.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Sekjen DPP PKS

“Berbagai strategi pelayanan dan advokasi untuk rakyat ini sudah dirumuskan dalam rapat-rapat online yang digelar sejak awal bulan. Saat puncak Rakernas ini akan dilakukan harmonisasi dan pengesahan hasil keputusan rapat tersebut. Insha Allah hasil rakernas ini akan semakin mengokohkan berbagai layanan yang diberikan PKS untuk masyarakat”

Ahmad Syaikhu Sampaikan Lima Visi Kepemimpinan Nasional di Penutupan Rakernas PKS

KUTIPAN

JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan lima Visi Kepemimpinan Nasional. Hal itu Syaikhu ungkapkan dalam Pidato Politiknya di Penutupan Rakernas PKS di Jakarta, Kamis, (18/3/2021).

Menurut Syaikhu, lima visi tersebut merupakan warisan dari Para Pendiri Bangsa yang patut dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, Visi Ketuhanan. Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa yang religius, yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, bangsa yang senantiasa menempatkan agama dalam tempat yang mulia. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara komunis yang mengabaikan peran agama.

Jika ada kebijakan yang berusaha memarginalkan atau bahkan menghilangkan peran agama dalam proses pembangunan di negeri ini, maka itu adalah tindakan yang mengkhianati Visi Ketuhanan.

"Oleh karena itu, jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukan peran agama dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan visi Ketuhanan," tegas Syaikhu.

Visi Ketuhanan, lanjut Syaikhu, adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan bangsa harus dimulai dengan semangat menghormati dan memuliakan ajaran dan nilai-nilai agama. Ir. Soekarno, Dr. Hatta, M. Natsir, Haji Agus Salim, Panglima Besar Jenderal Sudirman, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Maramis dan Para Pendiri Bangsa lainnya menyadari bahwa amanah kepemimpinan tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrowi.

"Kepemimpinan tidak hanya membangun kemajuan fisik berdimensi material tetapi juga membangun jiwa berdimensi transendental. Hal itu tercermin dari lagu kebangsaan 'Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya!'" ujar Syaikhu.

Kedua, Visi Kemanusiaan. Tanggungjawab negara adalah memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, melindungi hak-hak asasi manusia dan memajukan kualitas Sumber Daya Manusia. Indonesia bukan negara kapitalis-liberal yang meletakkan kepentingan pembangunan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan.

"Pemimpin yang memiliki Visi Kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi, negara harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya dibandingkan memacu pertumbuhan ekonomi," jelas Syaikhu.

Ketiga, Visi Kebangsaan. Kepemimpinan nasional harus berakar kepada VISI KEBANGSAAN yang sama: satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Visi kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah belah apalagi mengadu domba.

Di tangan pemimpin yang memiliki VISI KEBANGSAAN, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

> “Pemimpin yang ketika berbicara, rakyat bisa memegang teguh kata-katanya. Pemimpin yang ketika bekerja, rakyat bisa menikmati hasil karyanya. Pemimpin yang ketika berbuat salah, berlapang dada menerima nasehat dari rakyat yang dipimpinnya”

Selamat, Fraksi PKS Kembali Raih 3 Penghargaan Teropong Parlemen Award 2021

KUTIPAN

Jakarta (17/03) -- Fraksi PKS DPR RI kembali meraih 3 Penghargaan Teropong Parlemen Award 2021. Fraksi PKS tiga kali terpilih sebagai "Fraksi Paling Aspiratif" di DPR dalam acara Teropong Parlemen Award

yang digelar oleh Media Teropong Senayan secara online, Rabu (17/03/2021). Selain kategori Fraksi Paling Aspiratif, secara personal Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga dinobatkan penghargaan untuk kategori "Anggota Parlemen Making News Person," dan "Outstanding Parliamentarian Award of Covid Care."

Selama tiga tahun berturut-turut Fraksi PKS telah terpilih menjadi "Fraksi paling Aspiratif." Hal ini membuktikan konsistensi Fraksi PKS dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. "Program Hari Aspirasi" telah menjadi usaha Fraksi PKS untuk menghilangkan penghalang antara Anggota Legislatif dan masyarakat.

"Sejak saya ditunjuk jadi Ketua Fraksi, saya putuskan setiap hari Selasa dan Jum'at menjadi Hari Aspirasi Rakyat Fraksi PKS. Kita terima aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Kita tugaskan Komisi terkait untuk menerima aspirasi tersebut. Sehingga, tidak ada penghalang antara rakyat dan Fraksi PKS dari pusat hinggga Kabupaten/Kota. Hak rakyat akan terus kita perjuangkan sesuai kewenangan yang diberikan di legislatif ini," ucap Ketua Fraksi PKS tersebut.

Jazuli juga mendapatkan penghargaan "Outstanding Parliamentarian Award of Covid Care" sebagai Anggota Parlemen yang aktif berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Sebagai salah satu langkah penanganan, Jazuli membentuk Satgas Lintas Komisi yang juga telah menerbitkan Buku Putih tentang penanganan Covid-19 sebagai bentuk keseriusan Anggota Legislatif dalam menjalankan tugas wakil rakyat.

Jazuli bersama anggota dewan Fraksi PKS juga mengadakan pemotongan gaji dari pusat hingga Kabupaten/Kota demi membantu penanganan Covid-19 di daerah pemilihan dewan masing-masing.

"Ini merupakan bagian dari kontribusi sebagai keseriusan kami untuk membantu korban Covid-19 agar dapat ditangani. Semoga ini bisa menjadi edukasi bagi Indonesia terutama dalam membantu masyarakat. Semoga, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19." Ucap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini juga dinobatkan sebagai "Making News Person." Jazuli bersyukur dan berterima kasih atas penghagaan yang diberikan.

"Penghargaan ini kami persembahkan kepada para Pimpinan PKS yang kebetulan saat ini sedang mengadakan Rakernas. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati para Anggota Fraksi," pungkas Jazuli.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kepada seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan berita yang dikutip Fraksi PKS betul-betul berita yang mencerahkan, mencerdaskan, mengedukasi publik, dan menjadi informasi yang objektif dan benar. Sekaligus menggerakan masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa hoaks, tanpa fitnah yang merugikan saudara sebangsa setanah air,"

Mimbar Demokrasi Kebangsaan

HNW: Jangan Lupakan Sejarah dan Jasa Umat Islam

KUTIPAN

Jakarta (12/03) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengingatkan besarnya peran ulama dan umat Islam dalam memperjuangkan serta mempertahankan NKRI

Hal tersebut disampaikan dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Fraksi PKS DPR RI dengan tema "Moderasi Islam dan Kebangsaan Indonesia," Jumat, (12/03).

#MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN FRAKSI PKS DPR RI

Akrab disapa HNW, ia mengatakan bahwa pandangan yang menghadirkan Islamophobia dan Indonesiaphobia harus kembali diluruskan.

"Islamophobia karena mereka mempersepsikan bahwa islam dan umat islam seperti dijadikan sansak saja untuk agenda politik, agenda sosial, agenda ekonomi. Islam hanya dijadikan sebagai korban karena dianggap umat islam tidak mempunyai peran bagi Indonesia. Jadi karenanya mereka di stigma sebagai radikal. Yang lain melihat bahwa Indonesia ini sepertinya adalah yang semuanya serba berkonotasi kafir, bid'ah sehingga muncul yang disebut sebagai Indonesiaphobia. Mereka mengira bahwa Indonesia ini seolah-olah tidak ada." Tutur HNW.

HNW menegaskan bahwa untuk memperbaiki pandangan tersebut, sejarah dan jasa ulama serta umat islam terhadap Indonesia penting untuk diingat dan merupakan sebuah tantangan yang masih perlu dihadapi.

HNW mengingatkan kembali ketika masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Kerajaan-kerajaan Islam tanpa tawar-menawar langsung menyatakan dukungannya dan bergabung dengan NKRI.

"Begitu luar biasa mereka, begitu Indonesia merdeka, tanpa perang dan tanpa kompensasi dijadikan pejabat, mereka langsung bergabung. Itu salah satu fakta bagaimana keislaman dan keindonesiaan itu begitu luar biasa disatukan, diterima, dan dihayati." Ucap Ketua MPR (2004-2009) itu.

HNW juga menyinggung mengenai penerimaan umat Islam terhadap Pancasila meskipun sempat mengalami perubahan di sila pertama. Para Ulama tetap menerima Indonesia dengan resolusi Jihad di berbagai kota seperti Surabaya dan Yogyakarta.

"Sekalipun sila 1 berubah, mereka tetap mempertahankan Indonesia merdeka. Itu semua menggambarkan bagaimana islam meenunjukkan sikap yang jelas dan konkret bahwa penerimaan islam terhadap Indonesia memang demikian jelas, kon-kret, & heroik." Ungkap HNW.

Selain itu, HNW juga berpendapat bahwa tokoh nasional Indonesia, Bung Karno adalah sosok yang menghadirkan harmoni antara kebangsaan dengan keislaman menjadi satu.

"Beliau menegaskan bahwa piagam Jakarta adalah bagian tak terpisahkan dari UUD. Itu artinya, Pancasila sangat beliau hormati. Inilah bagian dari pembuktian bagaimana dari awal, antara keislaman dan Indonesia tidak terpisahkan." Ungkap HNW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Tanggung jawab umat islam lah bersama umat yang lain untuk kemajuan, kebaikan, dan kesatu paduan Indonesia. Dan bagi PKS, memperjuangkannya melalui parlemen adalah satu bukti tentang islam, moderasi, dan demokratisasi yang sangat kompetibel

Din Syamsudin: Wasathiyyah Merupakan Bagian Dari Pancasila

KUTIPAN

“Kita tetap bertoleransi, baik ekstra agama, maksudnya antar agama, intra agama, kita cenderung bermusyawarah, dalam melakukan perbaikan dalam kehidupan bersama ini.” jelas Din Syamsudin saat menjadi narasumber dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI.

#MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN FRAKSI PKS DPR RI

Jakarta (11/3) --- Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 2005 - 2015, Prof. Dr. Din Syamsudin, MA. menyampaikan pandangan mengenai Wasathiyyah Islam yang memiliki arti bahwa Islam merupakan agama yang mengambil nilai -nilai jalan tengah. Tokoh Moderasi Islam ini juga menambahkan dari pernyataan tersebut bahwa adanya kekeliruan untuk menyebutkan dengan istilah lain mengenai Wasathiyyah Islam.

“Kita tetap bertoleransi, baik ekstra agama, maksudnya antar agama, intra agama, kita cenderung bermusyawarah, dalam melakukan perbaikan dalam kehidupan bersama ini.” jelas Din Syamsudin saat menjadi narasumber dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI.

Tokoh Moderasi Islam ini juga memberikan suatu pernyataan bahwa jika Pancasila sebagai dasar negara dibedah dan diperjelas poin - poin di dalamnya, memiliki paradigma Wasathiyyah di dalam sila - sila nya.

“Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab itulah semacam ontologi, kemudian ada kerangka epistemologi persatuan dan permusyawaratan, dan kemudian rakitan paradigma etis itulah keadilan sosial.” Tegas Din Syamsudin menjelaskan.

Din Syamsudin mengemukakan, dasar negara Indonesia baik itu UU ataupun Pancasila dapat disimpulkan sebagai manifestasi Wasathiyyah Islam.

“Di Moderasi Islam, atau jalan tengah islam sudah senyawa dalam wawasan kebangsaan dan kenegaraan kita, dan termasuk UUD 1945.” jelasnya.

Dalam penyampaiannya ini pun, Din Syamsudin menegaskan perjuangan umat islam melalui partai - partai islam, ataupun organisasi islam harus selalu mengawal Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila yang beririsan dengan Islam.

“Pancasila, yang meletakkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai mahkotanya yang diperjelas oleh pasal 29 berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh Pancasila dipisahkan dari Agama.” Jelas Din Syamsudin dalam penutup pemaparannya sebagai Narasumber

Prof. Dr. DIN SYAMSUDIN, MA
Tokoh Moderasi Islam/Ketum PP Muhammadiyah 2005-2015

“Jika Pancasila sebagai dasar negara dibedah dan diperjelas poin - poin di dalamnya, memiliki paradigma Wasathiyyah di dalam sila - sila nya. Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab itulah semacam ontologi, kemudian ada kerangka epistemologi persatuan dan permusyawaratan, dan kemudian rakitan paradigma etis itulah keadilan sosial”

Antara Islam dan Demokrasi,

Azyumardi Azra: Indonesia Tak Terwujud Tanpa Umat Islam yang Akomodatif

KUTIPAN

“Tidak mungkin Indonesia itu bisa menjadi sebuah Negara dengan dasar Pancasila kalau Islam-nya tidak wasathiyah (seimbang), berbeda jika dibandingkan dengan di Eropa yang saat ini banyak sekali Negara berdasarkan agama,” ungkap Azyumardi pada Mimbar Demokrasi Fraksi PKS DPR RI, Jumat (12/03).

#MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN FRAKSI PKS DPR RI

Jakarta (12/03) –– Cendekiawan Muslim Asal Indonesia, Azyumardi Azra menyampaikan bahwa tidak ada masalah antara Islam dengan demokrasi di Indonesia Menurut Azyumardi, hal ini dikarenakan perkembangan politik Islam oleh tokoh terdahulu selalu berorientasi pada Negara Indonesia yang modern.

Azyumardi juga menekankan bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa ajaran Islam yang mengajarkan umatnya berperilaku seimbang atau moderat.

“Tidak mungkin Indonesia itu bisa menjadi sebuah Negara dengan dasar Pancasila kalau Islam-nya tidak wasathiyah (seimbang), berbeda jika dibandingkan dengan di Eropa yang saat ini banyak sekali Negara berdasarkan agama,” ungkap Azyumardi pada Mimbar Demokrasi Fraksi PKS DPR RI, Jumat (12/03).

Azyumardi menegaskan bahwa moderasi Islam bukan hanya sekadar pernyataan atau jargon semata.

“Indonesia tidak akan terwujud tanpa umat Islam yang akomodatif dan bisa menerima umat dari agama lain meskipun jumlahnya sedikit. Jadi moderasi Islam itu bukan sekadar pernyataan, jargon, apalagi sekadar gimmick,” tegas Azyumardi.

Pada akhir penyampaian, Azyumardi memberi tantangan kepada PKS sebagai partai Islam untuk mengusung Calon Presiden pada pemilu 2024.

“Saya kira tantangan bagi PKS ya, pada 2024 nanti PKS harus mengusung Presidennya sendiri. Partai Islam jangan menjadi partai pelengkap saja, masih ada sisa tiga tahun untuk merekrut orang-orang yang kecintaan terhadap islamnya meningkat.” tutup Azyumardi.

Prof. Dr. AZYUMARDI AZRA
Intelektual Muslim/Penulis Buku Moderasi Islam di Indonesia

“Moderasi Islam bukan hanya sekadar pernyataan atau jargon semata. Indonesia tidak akan terwujud tanpa umat Islam yang akomodatif dan bisa menerima umat dari agama lain meskipun jumlahnya sedikit. Jadi moderasi Islam itu bukan sekadar pernyataan, jargon, apalagi sekadar gimmick

Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS

Moderasi Islam Faktor Penting Kebangsaan Indonesia

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini memberikan sambutan pada Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Fraksi PKS DPR #2 dengan tema " Moderasi Islam dan Kebangsaan Indonesia" yang digelar secara virtual hari ini, Jum'at 12 Maret 2021. Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Din Syamsudin, Prof. Dr. Azyumardi Azra, dan Dr. Hidayat Nurwahid.

Dalam sambutannya Jazuli menegaskan bahwa PKS sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam menghadirkan Islam yang rahmatan lilalamin di bumi Indonesia. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga alam dan lingkungan, karenanya PKS selalu bersikap kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, merusak hutan, dan lingkungan.

"Tema moderasi Islam dan kebangsaan ini sengaja kami angkat agar kita semua umat Islam memiliki rasa tanggung jawab bahwa Islam menjadi faktor penting keindonesiaan. Maju mundurnya bangsa Indonesia, keberhasilan dan keterpurukan Indonesia, pasti ada andil dan kontribusi umat Islam," ungkapnya.

#MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN FRAKSI PKS DPR RI

Menurut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, Islam diterima luas di Indonesia dan kemudian menjadi agama mayoritas karena Islam memiliki karakter wasatiyah (moderasi/jalan tengah), keseimbangan, dan didakwahkan secara damai seperti dakwah Wali Songo yang tanpa ada pertumpahan darah sedikitpun. Selanjutnya, dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia maupun dalam pembentukan negara Indonesia merdeka, rasanya tidak bisa dipisahkan dari peran umat Islam dan para santri.

Menurut Jazuli Juwaini, NU menyebut Pancasila dan NKRI sebagai "Darussalam." Sementara Muhammadiyah menyebut Pancasila dan NKRI sebagai "Darul Ahdi wa Syahadah". Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia jelas negara beragama karena sila pertama Pancasila jelas menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa. "Inilah karakter Indonesia yang harus kita jaga sampai kapan pun, tegasnya"

Menurutnya, tanpa mengecilkan peran saudara-saudara dari agama lain, peran besar umat Islam, para santri, ulama, dan tokoh Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan berdirinya Indonesia tidak bisa dikecilkan. "Karena Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, maka harus menjadi perekat persatuan, penjaga indentitas dan karakter bangsa serta penggerak kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia," tegas Jazuli.

Pentingnya Konsistensi Melaksankan Prinsip Wasatiyah Islam

Sementara itu, Profesor Din Syamsudin mengatakan Islam adalah agama wasatiyah yang mencakup prinsip-prinsip seperti keseimbangan (tawazun), toleransi (tasammuh), lurus dan tegas (i'tidal), reformasi (islah), egaliter nondiskriminasi (musawah),

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Tema moderasi Islam dan kebangsaan ini sengaja kami angkat agar kita semua umat Islam memiliki rasa tanggung jawab bahwa Islam menjadi faktor penting keindonesiaan. Maju mundurnya bangsa Indonesia, keberhasilan dan keterpurukan Indonesia, pasti ada andil dan kontribusi umat Islam

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Terkait Kudeta Myanmar, Aleg PKS: Perlu Langkah Konkret Pemimpin ASEAN Cegah Jatuhnya Kembali Korban Jiwa

KUTIPAN

Jakarta (12/03) --- Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menilai, krisis politik yang kini tengah terjadi di Myanmar yang berawal dari peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi

pada 1 Februari 2021 bisa berkembang semakin buruk jika tidak ada upaya serius dari para pemim-pin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.

"Saya melihat situasi saat ini semakin tidak terkendali, karena konflik politik ini juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi, sementara di sisi lain ada gap politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elit politik yang berkuasa. Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar. Penggunaan kekerasan sangat mungkin akan dilakukan oleh pihak militer. Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran." Papar Sukamta.

Terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan berinisiatif melalukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis politik di Myanmar, Wakil Ketua Fraksi PKS ini memberikan apresiasi positif.

"Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di ASEAN, saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di ASEAN. Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepan-kan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myamnar," terangnya.

Namun demikian Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini juga meminta Pemerintah Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap tegas apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas.

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

> “Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di ASEAN, saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar”

"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan. Meski ada prinsip _non interfere_ dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi. Saya kira Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama ASEAN," tutup Sukamta.

Pemilu Serentak 2024, Aleg PKS: Merampas Hak Rakyat

KUTIPAN

“Revisi UU Pemilu mendesak karena sebagai pintu masuk untuk memulai perbaikan sistem politik & demokrasi di negeri ini. Revisi perlu didasarkan pada kepentingan publik jangka panjang. Hal substansial paling utama. Demokrasi pun akan sehat karena masyarakat menikmati dan tidak terbebani dengan pemilu yang marathon.” Ungkap Anggota Komisi II DPR RI itu.

Menurutnya, hak rakyat untuk menentukan Kepala Daerah sama saja dirampas dengan tidak adanya Pilkada tahun 2022 & 2023.

Lewat akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Mardani mempertanyakan independensi dalam menjaga Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Bagaimana menjamin independensinya dalam “menjaga” Pemilu dan Pilkada serentak 2024? Ini jelas bentuk kezaliman. Belum lagi kita perlu mendengarkan masukan KPU & Bawaslu yg menilai apabila Pemilu & Pilkada dilakukan serentak di 2024 maka akan sangat berat. Karena secara teknis cukup banyak tahapan yang harus dilalui secara detail, cermat & akuntabel oleh penyelenggara.” Tulis Mardani, Jum’at (10/03/2021).

Mardani juga menegaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak bisa ditinggalkan, mengingat masih banyak hal yang harus ditindak lanjuti. Seperti, enam opsi keserentakan dari MK yang merupakan payung bagi implementasi IT dalam pemilu.

“Revisi UU Pemilu mendesak karena sebagai pintu masuk untuk memulai perbaikan sistem politik & demokrasi di negeri ini. Revisi perlu didasarkan pada kepentingan publik jangka panjang. Hal substansial paling utama. Demokrasi pun akan sehat karena masyarakat menikmati dan tidak terbebani dengan pemilu yang marathon.” Ungkap Anggota Komisi II DPR RI itu.

Mardani juga menyinggung efisiensi anggaran yang belum tercapai dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.

“Sebagai contoh, Alokasi APBN untuk Pemilu Serentak 2019 sebesar 25,12 triliun, sedangkan Pemilu 2014 yang belum serentak berbiaya 24,8 triliun.” Pungkas Mardani.

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

“Bagaimana menjamin independensinya dalam “menjaga” Pemilu dan Pilkada serentak 2024? Ini jelas bentuk kezaliman. Belum lagi kita perlu mendengarkan masukan KPU & Bawaslu yg menilai apabila Pemilu & Pilkada dilakukan serentak di 2024 maka akan sangat berat. Karena secara teknis cukup banyak tahapan yang harus dilalui secara detail, cermat & akuntabel oleh penyelenggara.

MENGAPA PKS TETAP MEMPERJUANGKAN PILKADA 2022 dan 2023

Sistem Pelaksanaan

+ Lebih ringan & fokus karena tidak bebarengan dengan Pemilu Serentak 2024.
− "Pemaksaan" Pemilu & Pilkada Serentak 2024 berpotensi menimbulkan korban jiwa yang lebih besar dari Pemilu Serentak 2019 (894 Meninggal, 5.175 petugas dirawat di RS).

Sisi Pemilihan

+ Informasi yang didapat calon Pemilih terkait kapasitas & kapabilitas Calon Kepala Daerah akan lebih memadai.
− "Pemaksaan" Pemilu & Pilkada Serentak 2024 berpotensi membuat preferensi calon pemilih lebih banyak menjadi transaksional dan emosional.

Sisi Demokrasi

− "Pemaksaan" Pilkada Serentak 2024, menyebabkan ada 272 penjabat Kepala Daerah (24 prov, 57 Kot, 191 kab) yang melaksanakan tugas secara definitif tapi bukan dipilih langsung masyarakat. Kondisi ini berpotensi membuat oligarki kekuasaan oleh Pemerintah.

Sisi Anggaran

− Pemilu dan Pilkada Serentak lebih boros anggaran :
- Pemilu 2014 (belum serentak): 24,8 Triliun
- Pemilu 2019 (serentak): 25,12 triliun
- Pemilu dan Pilkada 2024 (serentak): 112,5 T (86,3 T APBN + 26,2 T APBD)

Anggota FPKS Minta BNN Tingkatkan Koordinasi antar Lembaga Guna Berantas Penyalahgunaan Narkoba

KUTIPAN

Jakarta (19/03) ---- Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Komjen Pol.(Purn) Adang Daradjatun meminta Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose selaku Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN),

untuk meningkatkan koordinasi antar institusi terkait dalam upaya pemberantasan narkotika

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III & Kepala BNN tersebut(18/3/2021), Legisla-tor PKS dari Dapil Jakarta tersebut mengingatkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar Lembaga sebagaimana tindak lanjut dari raker komisi III dan Kemenkumham beberapa waktu lalu.

"Sebagai kejahatan serius yang berdimensi transnasional crime, BNN harus meningkatkan koordinasi dengan memanfaatkan forum mahkumjakpol plus dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kita tentu berharap agar BNN dapat membangun sinergisitas bersama institusi terkait. Sebagai contoh dalam masalah peredaran narkotika di Lapas, BNN perlu membangun sinergisitas bersama Kementerian Hukum & Ham." ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir profil penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia belum mengalami perubahan berarti bahkan selama pandemic trennya terus meningkat.

Sebagai catatan angka prevalensi narkotika di Indonesia telah mencapai 3.41 Juta dengan jenis narkoba yang disalahgunakan didominasi oleh tiga jenis barang yaitu ganja dari aceh, sabu-sabu dari China & Iran serta ekstasi dari Eropa. Berdasarkan kajian BNN diketahui pula bahwa narkotika di Indonesia juga dipasok dari Kawasan Amerika Selatan (Golden Peacock), Timur Tengah (Golden Crescent), Indocina(Golden Triangle) serta Nigeria.

Dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut Adang Daradjatun berharap BNN dapat Menyusun Grand Strategy yang tepat dan efisien dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

"Saat ini setidaknya terdapat 931 kawasan rawan narkotika dengan kategori bahaya dan waspada, dengan terbatasnya anggaran dan sumber daya yang dimiliki, BNN diharapkan mampu memilah strategi kebijakan yang tepat seperti pendekatan Hard Power, Soft Power, Smart Power serta Empowering dalam mewujudkan Indonesia bersih narkoba (Indonesia Bersinar)" tambahnya.

Dalam pengujung Rapat Dengar Pendapat tersebut, Adang Dardjatun turut mengucapkan selamat kepada Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose atas pelantikannya sebagai kepala Badan Narkotika Nasional(BNN) beberapa waktu lalu.

Drs. H. ADANG DARADJATUN
Anggota Komisi III DPR RI

"Sebagai kejahatan serius yang berdimensi transnasional crime, BNN harus meningkatkan koordinasi dengan memanfaatkan forum mahkumjakpol plus dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kita tentu berharap agar BNN dapat membangun sinergisitas bersama institusi terkait. Sebagai contoh dalam masalah peredaran narkotika di Lapas, BNN perlu membangun sinergisitas bersama Kementerian Hukum & Ham

Aleg PKS Pertanyakan Kebijakan Impor Beras Pemerintah Disaat Persediaan Masih Ada

KUTIPAN

Beberapa waktu lalu Pemerintah memutuskan pada tahun 2021 ini akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan impor tersebut untuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri agar harganya bisa tetap terkendali.

Jakarta (16/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengungkapkan ketersediaan beras dalam negeri dari bulan Januari sampai Mei 2021 ini diperkirakan melimpah.

Menurut Hermanto, ketersediaan beras pada bulan Mei diperkirakan 24.901.172 ton sementara kebutuhan hanya 12.336.041 ton.

"Berarti diperkirakan ada surplus beras sebanyak 12.565.130 ton. Ketersediaan beras surplus tapi Pemerintah tetap ingin impor 1 juta ton. Dimana kebanggaan Pemerintah terhadap produk dalam negeri ? Dimana nasionalisme Pemerintah ?," tutur Hermanto.

Menurutnya, ketersediaan beras pada bulan Mei sebanyak 24.901.172 ton itu berasal dari stok beras di akhir Desember 2020 sebanyak 7.389.575 ton ditambah potensi produksi beras sebesar 17.511.596 ton.

"Semua angka tersebut dikemukakan oleh Pejabat Kementerian Pertanian yang dihadiri juga oleh Dirut Bulog dalam rapat dengan Komisi IV DPR ," ungkap legislator dari FPKS DPR ini.

Beberapa waktu lalu Pemerintah memutuskan pada tahun 2021 ini akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan impor tersebut untuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri agar harganya bisa tetap terkendali.

Sementara itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan beras atau iron stock guna memastikan beras selalu ada. Iron stock ini tidak dipengaruhi oleh panen atau apapun.

"Kalau sudah surplus mengapa mesti impor ?. Surplus beras itu bisa untuk memenuhi iron stock," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Ketersediaan beras pada bulan Mei diperkirakan 24.901.172 ton sementara kebutuhan hanya 12.336.041 ton. Berarti diperkirakan ada surplus beras sebanyak 12.565.130 ton. Ketersediaan beras surplus tapi Pemerintah tetap ingin impor 1 juta ton. Dimana kebanggaan Pemerintah terhadap produk dalam negeri? Dimana nasionalisme Pemerintah ?,

Anggota FPKS Sebut UU Cipta Kerja Telah Lahirkan Rezim Impor

KUTIPAN

Slamet menilai, perubahan yang ada di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut memberi kemudahan bagi aktivitas impor. Tentu ini merugikan dan tidak melindungi petani dalam negeri. Sebab, ketika pemerintah memberikan kemudahan impor, maka di saat itu produk pertanian kita terancam tidak terserap," kata Slamet kepada media, Rabu, (17/03/2021).

Jakarta (18/03) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet menyebut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merugikan petani dalam negeri dan melahirkan rezim impor.

Hal tersebut terlihat dalam perubahan di Omnibus Law yang merevisi Pasal 15, 30, dan 101 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Slamet menilai, perubahan yang ada di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut memberi kemudahan bagi aktivitas impor.

"Tentu ini merugikan dan tidak melindungi petani dalam negeri. Sebab, ketika pemerintah memberikan kemudahan impor, maka di saat itu produk pertanian kita terancam tidak terserap," kata Slamet kepada media, Rabu, (17/03/2021).

Legislator asal Sukabumi ini menjelaskan, beberapa perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menghilangkan kewajiban negara dalam melindungi petani dengan mengendalikan impor.

"Bahkan aturan ini menghapus sanksi bagi pelaku impor pangan yang melanggar ketentuan perundangan," tegasnya.

Selain itu, perubahan Pasal 14, 15, dan 36 di UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga semakin menegaskan bahwa pemerintah telah menjadi rezim impor pangan Indonesia.

Slamet menyebut, impor pangan telah menjadi salah satu sumber pangan nasional dengan menghapus kewajiban mengutamakan sumber pangan produksi dalam negeri.

"Contohnya saat ini Pemerintah berencana mengimpor beras 1 juta ton. Padahal petani kita akan panen raya. Otomatis kan itu tidak melindungi produk pertanian dalam negeri," pungkasnya.

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

“Perubahan yang ada di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut memberi kemudahan bagi aktivitas impor. Tentu ini merugikan dan tidak melindungi petani dalam negeri. Sebab, ketika pemerintah memberikan kemudahan impor, maka di saat itu produk pertanian kita terancam tidak terserap”

Rencana Buka Kran Impor Garam 2021, Aleg PKS Sarankan Pemerintah Sering Bertemu Petani Garam

KUTIPAN

Jakarta (17/03) --- Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin (AAP) Menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga presiden untuk sering-sering bertemu petani garam.

Hal ini disampaikan Akmal, menanggapi keputusan Pemerintah untuk melakukan impor garam pada tahun ini pada rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu.

"Sering-seringlah mereka itu ketemu petani garam. Kasih support yang baik, ajak dialog dan kasih solusi. Ini kok malah bikin menjerit para petani secara spontan dan membuat kaget banyak pihak", ketus Akmal.

Politisi PKS ini mendapat banyak sekali keluhan dan curhatan dari petani-petani garam rakyat di berbagai daerah. Akmal merasakan psikologis para petani garam ini karena ia juga besar dilingkungan pantai di Bone Sulawesi Selatan yang banyak juga penduduknya bekerja sebagai nelayan dimana menggantungkan kehidupannya dari Laut.

"Persoalan Garam ini, terutama garam Industri mirip-mirip beras. Tiap tahun tidak ada penyelesaian. Setiap tahun selalu memunculkan polemik. Padahal, semua pihak sudah memahami bahwa kebutuhan bangsa kita akan garam pada kendala kualitas untuk memenuhi kebutuhan Industri," ungkapnya.

Sedangkan ketersediaan garam nasional kita, tambah Akmal, sangat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan baik Industri maupun konsumsi bahkan berlebih jika pengelolaannya baik.

"Saya sejak masuk DPR 2014, sudah berteriak-teriak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan impor garam ini. Kini regulasi semakin longgar dengan adanya UU Cipta Kerja, dimana impor legal sebagai istilah kedaulatan. Kini kedaulatan komoditas kita sudah benar-benar melenceng dari arti sesungguhnya", ucap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mendapat laporan dari beberapa petani terkait beratnya kehidupan petani garam karena harga garam semakin merosot.

Pembinaan pemerintah selama ini tidak mampu mengentaskan persoalan yang dihadapi petani garam. Bahkan harga garam yang sempat Rp.125.000 per sak, kini sudah merosot tajam hingga Rp. 15.000, per sak.

"Garam di rakyat saat ini masih banyak yang belum terserap. Kalo impor diteruskan, ini sama saja menenggelamkan kehidupan petani garam secara pelan-pelan. Petani Garam saat ini sangat membutuhkan keberadaan pemerintah untuk menolong kehidupannya, Bukan keberadaan yang semakin mengkerdilkan mata pencahariannya dengan impor yang tidak seharusnya dilakukan. Impor ini jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan garam industri, tanpa memikirkan keberadaan garam rakyat yang mestinya ditingkatkan levelnya sehingga memenuhi syarat kebutuhan Industri", Pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

> "Garam di rakyat saat ini masih banyak yang belum terserap. Kalo impor diteruskan, ini sama saja menenggelamkan kehidupan petani garam secara pelan-pelan. Petani Garam saat ini sangat membutuhkan keberadaan pemerintah untuk menolong kehidupannya."

Keputusan Hapus Abu Batubara,

Johan Nilai Pemerintah Abaikan Kelestarian Lingkungan Hidup

KUTIPAN

Sumbawa (13/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, keputusan Pemerintah melalui PP No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur penghapusan limbah batubara dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) merupakan keputusan yang salah, karena telah mengabaikan aspek pentingnya kelestarian lingkungan dan Kesehatan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Johan untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan keselamatan lingkungan dan Kesehatan masyarakat di atas kepentingan ekonomi dan bisnis.

Politikus PKS ini menyatakan selama ini produksi limbah batu bara semakin meningkat dari tahun ke tahun bahkan dari KLHK menyebutkan bahwa dari batubara yang dibakar tiap satu ton akan menghasilkan abu batubara (fly ash) sekitar 15%-17%.

"Maka jika Pemerintah peduli dengan kelestarian lingkungan maka jangan hanya mendengar aspirasi dari pengusaha batubara namun prioritaskanlah kelestarian lingkungan dan Kesehatan masyarakat luas," ungkapnya.

Sebab menurut Johan limbah batubara sangat berbahaya karena mengandung senyawa kimia seperti arsenic, timbal dan merkuri.

Legislator dari dapil NTB 1 ini mengingatkan pemerintah bahwa banyak negara saat ini masih mengkategorikan limbah batubara sebagai bagian dari limbah yang berbahaya dan beracun.

"Jika pemerintah punya keinginan untuk memanfaatkan limbah batubara maka mesti ditemukan penggunaan yang tepat dan yang pasti bukan dengan cara menghapus abu batubara dari daftar limbah berbahaya", tutur Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini berpandangan bahwa dampak lingkungan dan bahaya Kesehatan yang ditimbulkan akibat limbah batubara sangatlah serius sehingga memerlukan penanganan khusus yang berkategori limbah bahan beracun dan berbahaya.

"Dari pembakaran batubara dihasilkan sekitar 5% polutan padat yang berupa abu terbang (fly ash) dan abu bawah (bottom ash), dimana sekitar 10 sampai 20 persen adalah abu bawah dan sekitar 80-90% adalah abu terbang dari total abu yang dihasilkan," ungkapnya.

Selanjutnya Johan meminta pemerintah dengan pertimbangan lingkungan dan keselamatan masyarakat agar tetap memasukkan abu batubara sebagai jenis limbah B3 serta menekankan tata Kelola abu batubara memenuhi prinsip pengelolaan lingkungan sehingga tidak merugikan kehidupan masyarakat sekitarnya.

"Keputusan Pemerintah ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dan untuk itu saya berharap perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah", tutup Johan Rosihan.

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

> "Jika Pemerintah peduli dengan kelestarian lingkungan maka jangan hanya mendengar aspirasi dari pengusaha batubara namun prioritaskanlah kelestarian lingkungan dan Kesehatan masyarakat luas. Sebab menurut Johan limbah batubara sangat berbahaya karena mengandung senyawa kimia seperti arsenic, timbal dan merkuri"

KOLASE KUTIPAN

Limbah sawit dan Limbah Batu bara dicoret dari Sampah B3. Itulah Mengapa dari Awal PKS Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

UU CIPTAKER MULAI ANCAM LINGKUNGAN

Keputusan pemerintah (PP No. 22 Tahun 2021) yang mengeluarkan limbah penyulingan kelapa sawit atau spent bleaching earth (SBE) dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) menuai kritik PKS

Andi Akmal:
Mulai Terlihat Dampak Buruk UU Ciptaker

"Sejak Awal Fraksi kami di PKS menolak UU Cipta Kerja terma-suk pada sektor perlindungan lingkungan ini karena akan ada regulasi lanjutan yang sangat longgar terhadap kerentanan kerusakan lingkungan seperti dikeluarkannya Limbah Batubara dan Limbah Sawit ini dari Limbah B3. Sudah mulai terlihat dampak buruk keberadaan UU Cipta Kerja ini bagi perlindungan lingkungan hidup.

Johan Rosihan:
Prioritaskan Kesehatan Masyarakat

"Selama ini produksi limbah batu bara semakin meningkat dari tahun ke tahun bahkan dari KLHK menyebutkan bahwa dari batubara yang dibakar tiap satu ton akan menghasilkan abu batubara sekitar 15%-17%. Maka jika Pemerintah peduli dengan kelestarian lingkungan maka jangan hanya mendengar aspirasi dari pengusaha batubara namun prioritaskanlah kelestarian lingkungan dan Kesehatan masyarakat luas

Mulyanto:
Pemerintah Jangan mau didikte Pengusaha

"Otoritas lingkungan hidup, sebagai garda terdepan yang dipercaya masyarakat sebagai penjaga kesehatan lingkungan publik, jangan mau didikte oleh pengusaha dengan mengorban-kan kesehatan publik. Karena dari berbagai riset, dalam limbah batubara banyak mengandung logam berat seperti tembaga, arsenik, dll. Zat-zat yang bersifat racun dalam abu batubara ini diperkirakan tidak hanya mence-mari tanah, udara dan air setem-pat, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan.

Aleg PKS: Menanti Keputusan Mudik Lebaran 2021, Kemenhub Siapkan Strategi Perketat Prokes

KUTIPAN

Tasikmalaya (17/03) --- Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki kewenangan memutuskan kepastian diperbolehkannya mudik Idul Fitri 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyatakan demikian apa yang disampaikan oleh Menhub.

“Menjawab pertanyaan tentang kepastian diperbolehkannya mudik Idul Fitri 2021, Menhub akan berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait karena Satgas Covid-19 juga akan memberikan arahan”, ungkapnya.

Toriq menambahkan bahwa, tidak ada pernyataan Kemenhub tidak melarang atau melarang, keputusan tentang mudik lebaran 2021 berada di tangan Satgas Covid-19. Mekanisme mudik tahun ini akan dikoordinasikan bersama Satgas Covid-19, dengan pengetatan.

“Adanya program vaksinasi, program relaksasi PPnBM nol persen bagi kendaraan tertentu, dan alat deteksi Genose akan membuat masyarakat lebih percaya diri melakukan perjalanan mudik tahun ini dan akan terjadi lonjakan yang signifikan”, ungkap Politisi PKS memperkirakan.

Oleh karenanya, Toriq menambahkan, Kemenhub yang merupakan bagian dari tim Satgas Covid-19 harus menyiapkan strategi pengetatan penerapkan protokol kesehatan di ruang lingkup kerjanya terutama pelayanan angkutan umum baik darat, laut dan udara.

Berdasarkan pengalaman dan evaluasi sebelumnya, kasus positif Covid-19 meningkat usai selesainya libur panjang.

"Pada liburan panjang tahun baru lalu. Kasus Positif melonjak signifikan. Lonjakan ini berdampak pada Rumah Sakit penuh, angka kematian meningkat," ujar Toriq.

Ia juga meminta masyarakat tetap menyadari bahwa pandemi belum usai dan perjalanan jauh berpotensi meningkatkan penularan.

"Pada dasarnya, dilarang atau tidaknya mudik 2021 nanti, masyarakat harus bijak untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," tutup Toriq .

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

“Adanya program vaksinasi, program relaksasi PPnBM nol persen bagi kendaraan tertentu, dan alat deteksi Genose akan membuat masyarakat lebih percaya diri melakukan perjalanan mudik tahun ini dan akan terjadi lonjakan yang signifikan”

Aleg PKS Kritik Pembukaan Izin Investasi Layanan Navigasi Penerbangan

KUTIPAN

Jakarta (13/03) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mengkritik pembukaan investasi pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Sigit menilai pelayanan navigasi penerbangan merupakan wujud kedaulatan bangsa yang seharusnya diselenggarakan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah.

"Saat kita sedang berjuang untuk mengambil kembali Flight Information Region (FIR) kita yang puluhan tahun dikelola Singapura, mengapa pemerintah justru membuka izin investasi untuk pelayanan navigasi penerbangan. Penguasaan navigasi penerbangan adalah wujud kedaulatan bangsa yang seharusnya tidak dibagi kekuasaan penyelenggaraan dan pengelolaannya kepada pihak asing dan itu dijamin dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Jadi, seharusnya pemerintah tidak asal membuka izin dengan alasan investasi, " Kata Sigit yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Tak hanya dianggap menggadaikan kedaulatan negara, pembukaan izin investasi pelayanan navigasi penerbangan juga berpotensi mengurangi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bentuk kelalaian Negara dalam membiarkan penguasaan wilayah udara Indonesia, dapat diartikan pula bahwa sebagai salah satu bentuk pembiaran atas kerugian Negara.

"Indonesia sangat menarik bagi asing karena untuk penerbangan domestik saja sebelum pandemi bisa menghasilkan Rp72 triliun per tahun. Tidak heran kalau negara lain ingin bisa melayani navigasi penerbangan kita. Kalau kita berikan penhelolaannya kepada asing, kita tidak hanya menggadaikan kedaulatan negara, tapi juga ada potensi lost PNBP yang seharusnya bisa menambah APBN kita, " Sigit.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi 20 sektor yang tadinya tertutup atau masuk daftar negatif investasi (DNI) menjadi terbuka. Selain industri minuman keras, Jokowi membuka investasi lain seperti penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, telekomunikasi atau sarana bantu navigasi pelayaran dan vessel traffic information system (VTIS), penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor.

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

“Penguasaan navigasi penerbangan adalah wujud kedaulatan bangsa yang seharusnya tidak dibagi kekuasaan penyelenggaraan dan pengelolaannya kepada pihak asing dan itu dijamin dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Jadi, seharusnya pemerintah tidak asal membuka izin dengan alasan investasi”

Aleg PKS wacanakan dana Pensiun untuk Kepala Desa

KUTIPAN

Jakarta (15/03) --- Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal pada Senin, 15 Maret 2021, Hamid Noor Yasin menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihannya yang juga bermanfaat bagi dapil lainnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut menyatakan perlunya insentif bagi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, terutama di masa pandemi ini.

"Sebagaimana diketahui bersama, di masa Pandemi Covid-19 menjadi fakta tak terbantahkan bahwasannya pengelolaan negara sangat bergantung ke unit pengelolaan terkecil yaitu Desa. Bahkan Pemerintah memberikan istilah PPKM Mikro, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro yang artinya dikelola intensif di Desa. Tentunya pemberlakuan PPKM Mikro ini membutuhkan extra effort dari Kepala Desa dan jajaran di bawahnya. Mereka menjadi ujung tombak, pasukan terdepan dalam melawan Covid ini," Ujar Hamid.

Anggota Komisi V itu kemudian meminta Pemerintah memberikan apresiasi yang selayaknya kepada para Kepala Desa dan jajarannya.

"Rasanya, apresiasi dari Pemerintah berupa Penghasilan tetap (Siltap) sesuai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 kemarin masih belum cukup. Kerja non-stop 24 jam, hp harus aktif terus sebagai jaga-jaga yang berkomunikasi dengan berbagai pihak, Alangkah laik bagi kita untuk menyesuaikan kembali aturan dimana siltap utuh diberikan bulanan, tidak terpotong asuransi kesehatan ataupun ketenagakerjaan. Atau rumusan variabel dana pensiun, karena pengabdian mereka yang cukup lama yaitu minimal 6 tahun dalam 1 periode (sesuai uu no. 6 tahun 2014 tentang desa)", terang anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV meliputi Wonogiri, Karanganyar dan Sragen ini.

Hamid menambahkan apresiasi kami terhadap PP no. 11 2019 tentang maksimal 30% Anggaran Dana Desa (ADD) untuk kebutuhan biaya operasional desa diharapkan dimonitor hingga aturan di bawahnya.

"Beberapa aspirasi dari desa, kelambatan pencairan, kesulitan akses menjadi kendala tersendiri untuk mempercepat pembangunan di desa," ungkapnya.

"Selain Siltap, perlu rasanya pemerintah juga membuat regulasi terkait tunjangan resmi kepala desa, semisal kalau ASN itu ada gaji 13, karena kepala desa punya siltap, maka tidak menutup kemungkinan gaji 13 tersebut juga bisa diperuntukkan untuk kades," tutup Hamid yang sempat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Wonogiri ini.

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.
Anggota Komisi V DPR RI

"Rasanya, apresiasi dari Pemerintah berupa Penghasilan tetap (Siltap) sesuai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 kemarin masih belum cukup. Kerja non-stop 24 jam, hp harus aktif terus sebagai jaga-jaga yang berkomunikasi dengan berbagai pihak, Alangkah laik bagi kita untuk menyesuaikan kembali aturan dimana siltap utuh diberikan bulanan, tidak terpotong asuransi kesehatan ataupun ketenagakerjaan.

Anggota FPKS Sesalkan Privatisasi Terselubung Saham Pegadaian dan PNM

KUTIPAN

Jakarta (09/03) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyesalkan rencana pemerintah melakukan right issue saham BRI setelah bank pelat merah tersebut mengakuisisi saham negara seri B di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).

Amin menilai langkah tersebut sama saja dengan privatisasi saham kedua BUMN yang selama ini bersentuhan dengan usaha mikro dan melayani kebutuhan dana rakyat kecil tersebut.

Seperti diketahui, saham negara seri B di PNM dan Pegadaian mencapai sekitar 99%. Sedangkan kepemilikan saham pihak asing di BRI sebesar lebih dari 35%.

Sebagaimana diketahui, dalam right issue, perseroan menawarkan hak (right) kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan saham baru dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham tersebut tidak mengambil haknya, maka ia dapat menjual hak-nya tersebut kepada investor lain.

"Ini sama saja dengan privatisasi terselubung terhadap PNM dan Pegadaian, meskipun kepemilikan saham oleh negara di BRI dominan. Saya khawatir hal itu akan mengubah fokus bidang usaha kedua BUMN pembiayaan usaha mikro tersebut," tegas Amin.

Menurut Amin, selama ini PNM dan Pegadaian memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan, lantaran turut melayani masyarakat yang tidak bisa dilayani bank atau nonbankable. Kedua BUMN tersebut juga berperan penting dalam membantu mencegah masyarakat terhindar dari jeratan rentenir.

"Saya tidak yakin pemerintah tidak akan kehilangan kontrol terhadap holding ultra mikro yang dibentuk karena sebanyak 40% sahamnya dimiliki swasta terutama pihak asing. Selain itu pemerintah juga bakal kehilangan referensi untuk mengatur usaha gadai yang tengah tumbuh marak di Indonesia," tambahnya.

Menurut Amin, Ia tidak anti investasi asing, namun karena PNM dan Pegadaian menyangkut hajat hidup rakyat kecil, maka dirinya menolak privatisasi saham kedua BUMN tersebut.

"Selain itu, dari sisi kinerja dan performa, kedua BUMN tersebut sangat bagus kinerjanya dengan tingkat kredit bermasalah yang sangat rendah. Artinya, selama ini mereka mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik," ungkapnya.

Semestinya holding BUMN ultra mikro itu fokus pada upaya memperbesar kredit atau bantuan modal bagi usaha mikronya. Bagaimana UMKM yang selama ini kesulitan mengakses permodalan dibantu dan dibimbing, termasuk usaha pertanian dan nelayan yang selama ini BRI saja kesulitan menyentuh mereka.

"Ini kok malah mendahulukan privatisasi sahamnya, ketimbang fokus pada upaya permodalan UMKM, khususnya pelaku usaha ultra mikro. Mirisnya sejak awal, pemerintah tidak terbuka soal tahapan-tahapan menuju holding BUMN Ultra mikro ini," pungkas Amin.

AMIN AK,M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

> "Dalam right issue, perseroan menawarkan hak (right) kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan saham baru dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham tersebut tidak mengambil haknya, maka ia dapat menjual hak-nya tersebut kepada investor lain. Ini sama saja dengan privatisasi terselubung terhadap PNM dan Pegadaian, meskipun kepemilikan saham oleh negara di BRI dominan

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMPERINGATI HARI AIR SEDUNIA 22 MARET 2021

Menjaga Air Sama Dengan Menjaga Kehidupan

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Aleg PKS Tolak Subsidi untuk Pengusaha dalam Draft RUU Energi Baru Terbarukan

KUTIPAN

Jakarta (16/03) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menolak ketentuan feed in tariff (FIT) dalam penentuan harga jual listrik pembangkit swasta ke PLN sebagaimana tercantum dalam draft RUU EBT.

FIT alias subsidi selisih harga terhadap BPP (biaya pokok pembangkitan) PLN, dari semua jenis dan kategori daya listrik sumber energi baru-terbarukan (EBT) dinilai lebih berat ke arah subsidi kepada pengusaha listrik dan akan membebani keuangan negara yang kini sudah terkuras untuk biaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Sumber EBT yang lain harus belajar dari sumber energi surya (PLTS), yang bersama perkembangan teknologi dan ekosistem bisnis yang baik, harganya terus turun," demikian kata Mulyanto dalam diskusi online Energy Talk 1.0 yang diselenggaran oleh DPP PKS dalam rangka menyambut Rakernas PKS, Senin (15/03/2021).

Hadir sebagai narasumber lain Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mantan Dirut PLN, Djiteng Marsudi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2013 harga listrik dari sumber tenaga surya sebesar 20 sen dolar (per kWh). Lima tahun terakhir harganya menurun sampai separonya menjadi 10 sen.

Dan data terbaru menyebutkan PLTS Apung di Cirata harganya 5,8 sen dolar (per kWh). Bahkan, diinformasikan ada calon investor yang berminat untuk investasi pembangunan PLTS di Tanah Air dengan harga listrik hanya sebesar 4 sen dolar per kWh. Di beberapa negara Asean harga listrik dari PLTS ini bahkan bisa mencapai 1.7 sen/kWh.

Lebih murah dari listrik PLTU Mulyanto menambahkan untuk EBT berdaya kecil dan berada di daerah pedalaman, dimana EBT adalah satu-satunya sumber energi listrik, maka menjadi wajar dan masuk akal kalau negara mensubsidi listrik EBT ini.

"Namun untuk listrik EBT berdaya menengah dan besar, sudah seharusnya didorong mekanisme yang lebih kompetitif dan sehat untuk pengusaha listrik swasta ini," ungkapnya.

Karena itu Mulyanto lebih setuju dengan norma pengaturan yang ada di UU Energi eksisting, terkait dengan harga listrik, dimana detil turunannya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah sebagai executive order. Sehingga harga listrik ini menguntungkan rakyat dan tidak membebani APBN Negara.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

> "Untuk EBT berdaya kecil dan berada di daerah pedalaman, dimana EBT adalah satu-satunya sumber energi listrik, maka menjadi wajar dan masuk akal kalau negara mensubsidi listrik EBT ini. Namun untuk listrik EBT berdaya menengah dan besar, sudah seharusnya didorong mekanisme yang lebih kompetitif dan sehat untuk pengusaha listrik swasta ini

Mitigasi Bencana, Aleg PKS: Badan Geologi Harus Aktif dan Komprehensif

KUTIPAN

Jakarta (16/03) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, meminta Badan Geologi aktif dan komprehensif melakukan program mitigasi bencana, terutama di Kawasan Rawan Bencana (KRB) dan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) .

Hal tersebut disampaikan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII dengan Badan Geologi Kementrian ESDM, di Jakarta, Selasa (16/03/2021).

"Dalam beberapa waktu terakhir bencana rutin terjadi, tadi Badan Geologi memaparkan hasil kajiannya, secara umum kondisi kita (Indonesia.red) sangat mengkhawatirkan, untuk itu kita minta program mitigasi yang komprehensif dan sinergis lintas sektor segera masif dilakukan", ujarnya.

Lebih lanjut, kata Nurhasan, hasil analisa dan kajian serta rekomendasi Badan Geologi ini harus benar-benar menjadi pertimbangan pengambil kebijakan khusunya pemerintah baik pusat maupun daerah, utamanya di kawasan pembangunan Proyek Nasional yang berpotensi rawan bencana.

"Majalengka misalkan, kondisi potensi rawan pergeseran tanah masih menjadi ancaman, bahkan kemarin sempat viral satu desa yang ditinggalkan warganya karena bencana tersebut, padahal saat ini Proyek nasional sedang dilakukan disana. Nah, disinilah perlunya Badan Geologi memasukkan Majalengka dan daerah lain yang sejenis dalam sasaran program prioritas mitigasi terpadu", lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut Nurhasan juga mengungkapkan pandangannya terkait permintaan Badan Geologi untuk pembuatan RUU Geologi oleh DPR, dimana dalam upaya pencegahan dan mengurangi dampak bencana Badan Geologi selalu memberikan rekomendasi Badan Geologi kepada pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Namun, karena tidak ada aturan yang mengikat, maka rekomendasi tersebut kerap diabaikan.

"Kita pahami kegelisahan teman-teman di Badan Geologi, namun urgensi RUU ini perlu dikaji secara komprehensif, bila memang mendesak bukan tidak mungkin kita akakn dorong. Dan sambil menunggu RUU masuk list prolegnas prioritas, penanganan bencana melalui Mitigasi ini harus terus dilakukan secara masif dan komprehensif sebagai langkah prioritas saat ini", ungkapnya.

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Hasil analisa dan kajian serta rekomendasi Badan Geologi ini harus benar-benar menjadi pertimbangan pengambil kebijakan khusunya pemerintah baik pusat maupun daerah, utamanya di kawasan pembangunan Proyek Nasional yang berpotensi rawan bencana."

Raker dengan Menteri Agama

Aleg PKS Minta Tambah Kuota Formasi Guru Agama PPPK

KUTIPAN

Jakarta (15/03) –– Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mendesak Kementerian Agama untuk segera mengusulkan penambahan kuota bagi rekrutmen formasi guru agama PPPK.

Menurut Bukhori, kuota yang diperoleh Kemenag sebanyak 9.464 dinilai tidak sepadan dengan jumlah guru agama honorer yang jumlahnya mencapai 125 ribu. Sementara di sisi lain, Kemendikbud justru memperoleh kuota sebanyak 1 juta formasi dalam rekrutmen guru PPPK tahun ini.

"Mohon Pak Menteri bisa perjuangkan rekrutmen PPPK bagi guru honorer agama. Saya minta adanya keadilan anggaran bagi pendidikan agama dan pendidikan umum," ungkapnya dalam rapat kerja gabungan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M, Senin (15/3/2021).

Pasalnya, lanjut Bukhori, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak mengenal pembedaan antara sekolah agama (madrasah) dengan sekolah umum. Tetapi ironisnya, dalam praktik penganggarannya justru terlihat disparitas yang tinggi, sambungnya.

"Yang paling menohok adalah dari sebanyak 125 ribu guru honorer agama, lantas hanya mendapat jatah 9 ribu saja. Jelas ini tidak masuk akal!," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PKS ini juga meminta Presiden Jokowi untuk membuka komunikasi dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, untuk memperoleh kepastian terkait keberangkatan jemaah haji asal Indonesia untuk pelaksanakan ibadah haji pada tahun 1442H/2021M.

"Sampai saat ini nasib calon jemaah haji kita masih terkatung-katung karena belum dapat kepastian. Karena itu, saya sarankan kepada Pak Presiden Jokowi untuk segera "say hello" pada Raja Salman supaya clear persoalannya," usulnya.

Bukhori menilai, inisiatif Jokowi untuk membuka komunikasi secara personal kepada Raja Salman akan lebih efektif dalam memperoleh kepastian ketimbang mengirimkan perwakilan pemerintah Indonesia untuk menemui langsung pemerintah Arab Saudi.

Terlebih, dirinya meyakini Presiden Jokowi memiliki hubungan kedekatan personal yang baik dengan Raja Salman mengingat dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2017 silam, Presiden Jokowi sendiri yang memayungi Raja Salman saat penyambutan di Istana Bogor yang saat itu tengah diguyur hujan deras.

"Saya pikir masalah soal kepastian ini akan cepat selesai bila Pak Jokowi segera menghubungi Raja Salman. Sebab, terkait penetapan kepastian pelaksanaan haji bukan domain Menteri, tetapi domain Raja," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini juga mengusulkan supaya ada vaksinasi gratis serentak untuk para calon jemaah haji Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Mohon Pak Menteri bisa perjuangkan rekrutmen PPPK bagi guru honorer agama. Saya minta adanya keadilan anggaran bagi pendidikan agama dan pendidikan umum"

Pemerintah Tunda Penggunaan Vaksin AstraZeneca,

Politisi PKS: Lakukan Asesmen Menyeluruh

KUTIPAN

Jakarta (16/03) --- Pemerintah menyatakan menunda penggunaan vaksin AstraZeneca hingga ada hasil penelitian organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait efek sampingnya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk melakukan asesmen menyeluruh.

"Sejak awal sudah saya pertanyakan apakah izin EUA AstraZeneca keluar melalui prosedur standar? Sebagaimana diketahui, tidak dilakukan uji klinis terhadap vaksin tersebut di Indonesia. Oleh sebab itu, saya mendukung penundaan penggunaannya dan meminta pemerintah melakukan asesmen menyeluruh. Jangan sampai kita kecolongan karena tergesa-gesa memberikan izin penggunaan darurat," ujar Netty dalam keterangan media, Selasa, (16/03/2021).

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI, meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan," tandasnya.

Dalam pemberitaan media sebelumnya, disebutkan sejumlah negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Bulgaria, Denmark, Islandia dan lain-lain telah menyatakan menunda penggunaan vaksin Covid-19 buatan perusahaan Inggris tersebut, akibat adanya laporan kasus pembekuan darah dan kemungkinan efek samping lainnya dari vaksin tersebut.

"Harus ada evaluasi atas temuan dugaan efek samping dari vaksin AstraZeneca di luar negeri. Kita butuh cepat dan segera selesaikan program vaksinasi, tapi harus tetap mengutamakan keamanan. Kita sedang perang melawan Covid-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis" ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Netty juga meminta pemerintah agar memastikan nasib 1,1 juta dosis serta 50 juta dosis vaksin AstraZaneca yang sudah didatangkan dan dibeli pemerintah.

"Bagaimana nasib 1,1 juta vaksin yang sudah didatangkan dan 50 juta yang sudah dibeli pemerintah? Menurut info, masa kadaluwarsa 1,1 juta dosis tersebut hanya sampai Mei 2021. Sekarang sudah memasuki pertengahan Maret. Bagaimana kalau kita tidak mampu menggunakan vaksin tersebut sebelum masa kadaluwarsanya habis?" katanya.

"Pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Kejadian ini harus jadi catatan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembelian dan mendatangkan vaksin. Jangan sampai karena skema vaksin gratis, kita jadi lemah dan tidak mandiri. Penting juga dijelaskan pada masyarakat apakah skema vaksin gratis COVOX - WHO ini benar-benar bantuan murni bebas syarat. Jangan sampai publik berpikir, 1,1 juta dosis gratis didapatkan karena bersedia membeli 50 juta dosis lainnya," kata Netty.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

> "Pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Kejadian ini harus jadi catatan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembelian dan mendatangkan vaksin. Jangan sampai karena skema vaksin gratis, kita jadi lemah dan tidak mandiri"

Evaluasi Penanganan Covid 19,

Anggota FPKS Sampaikan Aspirasi Masyarakat di Dapil pada Menkes

KUTIPAN

Jakarta (15/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat 1, Alifudin menanyakan terkait kebijakan vaksinasi dan kebijakan Pemda Kalbar untuk para pendatang, pada Raker Komisi IX dengan Kementerian dan mitra kerja di gedung DPR RI pada Senin (15/03).

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi IX dihadiri langsung Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin, Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah serta Satgas Covid-19, Kepala BPOM dan Dirut Biofarma.

Agenda Raker dan RDP membahas Evaluasi satu tahun penanganan Covid 19 di Indonesia dengan salah satunya terkait vaksinasi.

"Kami baru pulang dari Dapil Kalbar 1, banyak yang bertanya soal vaksin, apakah kebijakan untuk warga yang sudah di vaksinasi bisa bepergian tanpa hasil tes, kapan di realisasinya?" Tanya Alifudin Anggota DPR RI Fraksi PKS, pada Raker Komisi IX.

"Sebab, Kebijakan pemerintah untuk bepergian ke setiap daerah harus menunjukan hasil tes, ada PCR, Rapid Tes Anti Gen, atau dengan GeNose di lokasi bandara," tambah Alifudin.

Sebagaimana diketahui setiap warga yang ingin mendapatkan hasil tes dari Swab PCR, hampir rata-rata harus merogoh kocek Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 tergantung rumah sakit dan waktu durasi keluarnya hasil tes.

"Pak Menteri, ada aspirasi juga, bahwa untuk ke Kalimantan Barat bukan memakai anti gen, tetapi PCR pak. Bulan april banyak anak anak yang mondok di pulau Jawa akan kembali ke Kalbar. Jadi banyak yang keberatan para orang tuanya dan bertanya ke saya, baiknya disamakan dengan bandara lain," tambah Alifudin.

Alifudin juga menegaskan saat Raker dengan mitra Komisi IX, bahwa nanti pada tanggal 26 Maret akan ada kunjungan kerja di Dapil Kalimantan Barat. Bahwa setiap Anggota Legislatif yang nanti kesana harus menyiapkan Swab PCR.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa warga yang sudah di vaksin belum bisa untuk terbang bebas tanpa ada hasil tes covid-19, karena epidimologi masih belum sepakat mengenai hal tersebut, walau setiap warga yang sudah di vaksin mendapatkan serifikat.

"Soal kewajiban Swab PCR di Kalimantan barat, nanti kami akan koordinsikan dengan kadinkes Kalimantan Barat setelah raker ini" tegas Menteri Kesehatan Budi Gunadi.

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M
Anggota Komisi IX DPR RI

"Pak Menteri, ada aspirasi juga, bahwa untuk ke Kalimantan Barat bukan memakai anti gen, tetapi PCR pak. Bulan april banyak anak anak yang mondok di pulau Jawa akan kembali ke Kalbar. Jadi banyak yang keberatan para orang tuanya dan bertanya ke saya, baiknya disamakan dengan bandara lain"

Evaluasi Setahun Pandemi

Aleg PKS Berikan Catatan Kasus di Hadapan Menkes

KUTIPAN

Jakarta (15/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengungkapkan beberapa catatan saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Tenaga Kerja, Kepala BPOM, BNPB dan BioFarma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/03).

Catatan pertama terkait lamanya hasil PCR yang diterima oleh pasien. Kecepatan informasi hasil PCR sangat menentukan keberhasilan 3T di Indonesia. Data yang didapatkan saat reses, hasil PCR pasien di RS, antara 3-5 hari.

"Bahkan tak jarang, sampai pasien meninggal, hasil PCR belum keluar. Ini tentu saja terlalu lama untuk keputusan treatmen pasien, karena treatmen bisa dilakukan dengan tepat sesuai hasil PCR," ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II ini meminta setahun Pandemi Covid-19, hasil tes PCR seharusnya bisa dipercepat hanya sehari setelah test. Semakin cepat hasil tes diperoleh, maka pasien bisa segera diterapi sesuai dengan tingkat kegawatannya.

Persoalan tes PCR sudah terjadi pada WNI yang pulang ke Tanah Air. Mufida mendapatkan fakta bahwa dalam lima hari karantina, WNI harus melewati dua kali tes PCR. Padahal sebelum terbang ke Indonesia, WNI tersebut juga sudah melakukan PCR.

"Ini kan ada banyak pelajar dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang harus tiga kali PCR dalam lima hari. Selain kasihan, ini juga tidak efisien dari segi anggaran. Bisakah hanya dua kali saja PCR. Lalu apakah perlakuan yang sama juga diberlakukan untuk WNA yang masuk kesini? Apakah untuk WNA dan TKA seketat itu?" ungkap Mufida.

Catatan lain yang sering menjadi temuan saat ini adalah sejumlah laporan adanya pasien yang usai divaksin kemudian muncul gejala Covid-19, bahkan ada yang kemudian meninggal pascavaksin. Situasi ini semakin menguatkan stigma negatif tentang vaksin, karenanya harus segera dilakukan antisipasi. Mufida mengusulkan untuk yang kesekian kalinya perlunya screening virus dengan alat tes yang akurat bagi masyarakat sebelum divaksin.

Mufida juga meminta data jumlah orang yang sudah melakukan vaksinasi kemudian terpapar positif Covid-19. Sebab fakta ini justru akan memberikan sentimen negatif dalam proses vaksinasi yang tengah berjalan.

"Kami mohon data berapa yang sudah divaksinasi kemudian terpapar positif. Ini nanti untuk membandingkan tingkat efikasi Sinovac di angka 65,3 persen riil tidak. Sebab kami di lapangan terus mendukung sosialisasi vaksin, kalau sentimen ini tidak diperhatikan bisa semakin berat," terang Mufida.

Terakhir, Mufida mengingatkan evaluasi satu tahun Pandemi perhatian terhadap tenaga kesehatan tidak dikurangi. Saat tengah berjuang, ada beberapa kebijakan yang justru memberatkan tenaga kesehatan salah satunya rencan pemotongan insentif.

"Mereka itu mempertaruhkan jiwa dan raga. Ke depan saya garisbawahi, harus ada perhatian yang lebih tinggi terhadap kesejahteraan dan proteksi tenaga kesehatan khususnya dalam penanganan Covid-19 supaya terlindungi," ujarnya.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Kami mohon data berapa yang sudah divaksinasi kemudian terpapar positif. Ini nanti untuk membandingkan tingkat efikasi Sinovac di angka 65,3 persen riil tidak. Sebab kami di lapangan terus mendukung sosialisasi vaksin, kalau sentimen ini tidak diperhatikan bisa semakin berat,"

PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Darmaningtyas
Praktisi Pendidikan

Membalas @JazuliJuwaini

Selamat untuk PKS yang merupakan satu-satunya Parpol yang mau minta masukan tentang isu-isu pendidikan krusial dari saya yang aktivis kerakyatan (udah beberapa kali)

7.08 AM · 19 Mar 2021·Twitter Web App

Aleg PKS Desak Kemendikbud Sertakan Seleksi PPPK Bagi Guru Honorer Sekolah Swasta

KUTIPAN

Jakarta (11/03) -- Seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer tahun 2021 akan segera dibuka. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan proses seleksinya.

Kemendikbud menyatakan bahwa ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing, ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG.

Menggapi hal tersebut, Anggota Legislative Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, memberikan tanggapan atas rencana Kemendikbud yang akan melakukan seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri.

"Terkait dengan seleksi guru honorer menjadi PPPK pertama yang dikhususkan untuk guru-guru negeri, saya berharap mas menteri memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru honorer baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta," ungkap Sakinah pada rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rabu, (10/03).

Anggota Komisi X ini pun menambahkan bahwa dalam kegiatan reses anggota dewan selalu mendapatkan curhatan dari guru honorer di daerahnya yang selalu menjerit agar diperhatikan oleh Pemerintah.

"Mereka para guru honorer selalu menjerit, mereka adalah anak bangsa yang mengabdi untuk daerahnya, mengabdi untuk Indonesia mencerdaskan anak bangsa," ungkapnya.

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini pun menegaskan agar Pemerintah adil bagi seluruh guru honorer negeri maupun swasta.

"Saya menekankan dan mengingatkan mas Menteri dan jajarannya tentang ujian seleksi ini. Bahwa pemerintah harus adil dalam memberikan hak dan bimbingan terhadap semua sekolah yang ada di negeri ini, tidak membedakan antara yang negeri dan yang swasta apalagi yang berkaitan dengan kesejahteraan guru," tutur Sakinah.

akinah pun mewanti-wanti Mendikbud untuk tidak menganak tirikan guru honorer yang berkiprah di sekolah swasta dalam seleksi menjadi pegawai PPPK.

"Jangan jadikan mereka anak tiri di negeri sendiri, sekali lagi kami menekankan kepada mas Menteri untuk bersikap adil dan memberikan ruang untuk guru honorer di sekolah swasta pada seleksi tahap pertama ini," pungkasnya.

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Komisi X DPR RI

"Saya menekankan dan mengingatkan mas Menteri dan jajarannya tentang ujian seleksi ini. Bahwa pemerintah harus adil dalam memberikan hak dan bimbingan terhadap semua sekolah yang ada di negeri ini, tidak membedakan antara yang negeri dan yang swasta apalagi yang berkaitan dengan kesejahteraan guru"

Indonesia Didepak dari All England,

Aleg PKS: Bahan Evaluasi Kemenpora-PBSI

KUTIPAN

Jakarta (19/03) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih memandang perlunya Kemenpora dan PBSI sebagai pemangku otoritas bulutangkis Indonesia untuk melakukan evaluasi diri terkait didepaknya Indonesia dari ajang All England 2021.

"Persiapan matang tidak hanya soal bagaimana performa para atlet dan ofisial menghadapi pertandingan, yang tak kalah penting adalah apakah sudah memperhitungkan pula persyaratan lain terkait perhelatan kejuaraan di masa pandemi Covid-19?" tanya Fikri di DPR, Jumat (19/03).

Fikri mempertanyakan terkait jadwal keberangkatan tim yang dinilai mepet dengan jadwal kick-off, padahal dibayangi peraturan negara tujuan di masa pandemi Covid-19.

"Ini jadi poin evaluasi kepada Kemenpora dan PBSI, seharusnya tim yang dikirim memperhitungkan waktu tenggang atau tunggu saat kedatangan di negara tujuan, terutama yang mewajibkan karantina kesehatan," ujar Politisi PKS ini.

Seperti diketahui, perhelatan All England 2021 digelar mulai Rabu (17/03), sedangkan tim bulutangkis RI baru bertolak dari Jakarta pada Jumat (12/3) dan tiba pada Sabtu (14/3) di Birmingham, Inggris.

Hal ini dinilai terlalu beresiko, karena ada peraturan yang mewajibkan warga negara asing yang berkunjung ke Ingggris (UK) untuk karantina selama 10 hari bila diketahui ada yang terpapar Covid-19.

Dia menambahkan, di masa pandemi ini, setiap negara punya kebijakan berbeda terkait pelaksanaan karantina warga asing yang berkunjung. "Jadi persiapan timnas-apapun jenis olahraganya-, yang bertandang di venue negara lain, harusnya mempersiapkan dengan matang termasuk apabila ada yang terpapar dan prosedur karantina yang disyaratkan," tegas dia.

Lebih jauh, Fikri juga menilai seharusnya tim kontingen Indonesia didampingi oleh diplomat yang mumpuni dalam melindungi hak-hak atlet dan official yang bertanding mewakili RI.

"Sehingga ketika ada dugaan diskriminasi atau ketidak-adilan dalam proses kejuaraan internasional seperti di All England, langsung bertindak saat itu juga," katanya.

Meski demikian, berdasarkan kronologis yang disampaikan Official, seluruh kontingen bulutangkis Indonesia sudah dipastikan bebas dari Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR yang disyaratkan panitia begitu timnas mendarat di Birmingham. Bahkan, timnas sudah mengikuti pertandingan sejak Rabu (17/03).

"Dari kronologi kejadian, kita dapat melihat dengan jelas, sebenarnya alasan panitia mendepak Indonesia dari kejuaraan All England sangat tidak logis, karena seluruh tim Indonesia terbukti bebas Covid," sesal Fikri.

"Kemudian timbul dugaan diskriminasi karena hanya tim Indonesia yang didiskualifikasi, padahal kalau mau adil, seluruh ajang All England sudah terpapar, karena tampilnya pemain Indonesia yang mestinya dikarantina," imbuh dia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Di masa pandemi ini, setiap negara punya kebijakan berbeda terkait pelaksanaan karantina warga asing yang berkunjung. Jadi persiapan timnas-apapun jenis olahraganya-, yang bertandang di venue negara lain, harusnya mempersiapkan dengan matang termasuk apabila ada yang terpapar dan prosedur karantina yang disyaratkan,"

Legislator PKS: Pelaksanaan Pembelajaran Hybrid Harus Disiapkan Cermat

KUTIPAN

Jakarta (19/03) --- Rencana besar Kemendikbud untuk bisa mulai melakukan pembelajaran tatap muka di awal tahun ajaran baru bulan Juli 2021 secara hybrid (campuran dengan pembelajaran daring) mendapat berbagai tanggapan dari anggota DPR RI Komisi X dalam rapat kerja yang berlangsung di Senayan, Kamis (18/03/2021) lalu.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, mengapresiasi rencana besar tersebut dengan mengingatkan perlunya kecermatan dan kesiapan yang matang mengingat Bulan Juli hanya tinggal beberapa waktu lagi.

"Campuran pembelajaran tatap muka dan daring yang kita dengar sebagai pembelajaran hybrid ini harus disiapkan dengan sangat matang dan cermat mengingat begitu beragamnya situasi kondisi, prasarana dan sarana pembelajaran di negara kita. Kematangan dan kecermatan penyiapan proses kedua sistem belajar ini sangat diperlukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung efektif, efisien dan tidak memberatkan baik bagi murid, pendidik juga orangtua." papar Ledia.

Dalam masa PJJ tanpa hybrid saja, jelas Aleg dapil Kota Bandung Kota Cimahi ini lagi, masih banyak PR dalam proses pembelajaran seperti bahan ajar, pilihan media ajar, proses evaluasi pembelajaran belum lagi soal-soal teknis tekait gadget, sinyal dan kuota.

Sementara menjelang pembelajaran tatap muka, selain persiapan proses pembelajaran, sekolah pun harus memastikan sarana prasana prokes harus memadai.

Karena di bulan Juli menurut Mendikbud sekolah wajib memberikan dua pilihan proses pembelajaran kepada orangtua yaitu secara tatap muka atau daring, dan melaksanakan kedua jenis pilihan pembelajaran ini Ledia khawatir bila ada proses pembelajaran yang kurang optimal karena area fokus guru5 menjadi lebih luas.

"Guru harus menyiapkan bahan ajar lalu menyiapkan metode ajar baik kepada murid yang memilih tatap muka maupun daring. Memastikan berjalannya prokes bagi siswa tatap muka sekaligus mengawal dan mengevaluasi pembelajaran daring. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para guru juga sekolah." terang Ledia.

Karena itu Sekretaris Fraksi PKS ini lantas menyarankan agar Kementerian harus segera membuat juknis terkait persiapan pembelajaran hybrid ini ke depan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

"Juknis ini sebaiknya menyertakan arahan terkait persiapan menjelang pembelajaran hybrid, proses pembelajaran hybrid termasuk evaluasi pelaksanaannya dalam pemaparan yang cukup detail pada masing-masing metode pembelajaran, baik tatap muka maupun daring. Sehingga meskipun katakanlah yang memilih pembelajaran tatap muka hanya 10 persen siswa atau sebaliknya yang memilih pembelajaran daringlah yang hanya 10 persen, guru tetap memberikan fokus perhatian dan persiapan yang sama baiknya

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tiga Catatan
Tekait dana BOS

- **Pencairan Dana BOS jangan sampai terlambat. Sebab hal itu akan menghambat kegiatan operasional sekolah.**
  "Dalam berbagai kunjungan ke sekolah, kami mendapati keluhan terkait kerapnya dana BOS ini terlambat cairnya. Padahal dana BOS ini menjadi salah satu andalan sekolah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah termasuk penggajian guru honorer

- **Soal hak-hak para tenaga kependidikan yang disebutkan dalam kebijakan kemen-dikbud honornya dapat dibayarkan dari sisa dana BOS.**
  "Rasanya tidak adil bila bagi para tenaga kependidikan ini hanya dianggarkan dari dana sisa BOS. Padahal tugas yang mereka emban adalah kegiatan rutin. Penganggaran dari sisa dana BOS seakan menyepelekan beban kerja mereka padahal beban tugas mereka juga bukan perkara mudah

- **Soal keharusan berbelanja barang melalui platform SIPlah. Meski mengakui bahwa ide dasar dari penerapan SIPlah ini baik sebagai upaya untuk meminimalisir kecurangan dan memperbaiki administrasi keuangan sekolah.**

Hj. LEDIA HANIFA S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

Ledia berharap agar Kemendikbud bisa membangun kebijakan yang dapat mempertimbangkan kondisi situasi-onal semacam itu agar sekolah tetap bisa menyelengga-rakan kegiatan tanpa terhambat persoalan-persoalan teknis administratif

Demi Kejar Setoran, RUU Pajak Masuk Prolegnas

KUTIPAN

Jakarta (12/03) --- Pemerintah secara resmi meminta kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan, meskipun sebagian ketentuan perpajakan sudah diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun demi penerimaan negara RUU KUP ini diminta untuk masuk dalam Prolegnas 2021.

"Karena persoalan pajak ini yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting, perlu kita pertimbangkan (masuk dalam Prolegnas 2021) jika fraksi-fraksi setuju," jelas Yasonna saat melakukan rapat dengan Baleg DPR, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (10/3/2021).

Yasonna mengatakan sebenarnya RUU KUP juga sebelumnya sudah pernah dibahas bersama DPR, namun kemudian tertunda.

"Karena ini sebelumnya juga sudah masuk, tinggal kita mau dorong saja. Karena kita sudah bicarakan, bahkan hampir dulu sempat dibahas, kemudian karena kita masuk ke undang-undang yang lain, ini tertunda," kata Yasonna melanjutkan.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan RUU KUP ini mencakup banyak bahasan tentang perpajakan. Intinya, RUU KUP ini akan mengatur secara keseluruhan perpajakan Indonesia.

Pun sebenarnya kata Andi sebelumnya RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini juga pernah dibahas antara pemerintah dengan Komisi XI DPR, namun tidak selesai.

Kendati demikian, RUU KUP yang diusulkan oleh pemerintah ini belum diserahkan kepada DPR. "Kita berharap ini segera diajukan oleh pemerintah ke depan," jelas Supratman kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/3/2021).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai sangat perlu memasukkan RUU KUP masuk di dalam Prolegnas 2021. Agar terciptanya perpajakan yang adil, berkelanjutan dan efektif.

Terpenting kata Hendrawan agar bisa meningkatkan penerimaan negara, yang pada akhirnya tax ratio bisa meningkat. Terpenting lewat RUU KUP ini, kata Hendrawan bisa dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan rezim perpajakan Indonesia.

"Saat ini, peluang meningkatkan tax ratio terutama adalah memperbaiki administrasi perpajakan. Bolak-balik orang bisa membobol penerimaan perpajakan kita," ujar Hendrawan kepada CNBC Indonesia.

"Padahal bila sistemnya bagus dan fraud-free (kalis penyimpangan), penerimaan diduga bisa 1,5 kali dari realisasi sekarang. Ini peningkatan yang berarti di tengah kecenderungan utang yang terus meningkat," kata Hendrawan melanjutkan.

Senada, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati memandang RUU KUP ini adalah pondasi dan pilar penyangga untuk reformasi perpajakan. Untuk memulai reformasi perpajakan yang komprehensif, menurut dia bisa dimulai dari RUU KUP ini.

"Intinya dengan adanya UU KUP ini, bagaimana DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bisa berperan maksimal dalam mengupayakan penerimaan negara dari sektor pajak," jelas Anis.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Intinya dengan adanya UU KUP ini, bagaimana DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bisa berperan maksimal dalam mengupayakan penerimaan negara dari sektor pajak

RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2021

19 RUU
Usul Inisiatif DPR
8 RUU Usulan Komisi
7 RUU Usulan Badan Legislasi
4 RUU Usulan Anggota

2 RUU
Usul Inisiatif DPD

10 RUU
Usul Inisiatif Pemerintah

2 RUU
Usul Inisiatif DPR/ Pemerintah

Sikap PKS :

Apabila hanya mengatur tugas dan fungsi organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tidak perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang.

Jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tetap diusulkan harus memperhatikan norma agama dan nilai budaya bangsa sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila serta Pasal 29 dan 31 ayat (3) UU NRI Tahun 1945.

● **Sumber :** Kesimpulan Rapat 9 Maret 2021 Baleg DPR RI ● **Grafis** : Aditya Angga

DAFTAR 33 RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2021

19 RUU Usul Inisiatif DPR

- RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- RUU tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
- RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kep. Riau Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, dan Manado
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kep. Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.
- RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
- RUU tentang Praktik Psikologi
- RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

10 RUU Usul Inisiatif Pemerintah

- RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
- RUU tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- RUU tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).
- RUU tentang Ibukota Negara.
- RUU tentang Hukum Acara Perdata.
- RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
- RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2 RUU Usul Inisiatif DPR/Pemerintah

- RUU tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

2 RUU Usul Inisiatif DPD

- RUU tentang Daerah Kepulauan.
- RUU tentang Badan Usaha Milik Desa

● **Sumber** : Kesimpulan Rapat 9 Maret 2021 Baleg DPR RI ● **Grafis** : Aditya Angga

Realisasi Anggaran Dana Desa Terhitung Baik, Aleg PKS Minta Alokasinya Ditingkatkan

KUTIPAN

Jakarta (14/03) --- Realisasi dana desa sebagai salah satu kebijakan moneter merupakan contoh kebijakan yang tepat guna dalam krisis ekonomi dan krisis Kesehatan saat ini.

Penyesuaian dan optimalisasi dana desa dilakukan untuk mendorong pembangunan desa dan mencegah terjadinya krisis ekonomi berat di pedesaan.

Peran pemerintah melalui penyesuaian kebijakan serta optimalisasi realisasi dana desa, dinilai sangat penting. Hal ini ditujukan agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum tetap terjaga, khususnya di masa krisis Covid-19.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan bahwa BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa, dan Desa Tangguh Covid-19 harus terus dilanjutkan.

Hal ini disampaikan Anis pada wawancara khusus dengan Radio Suara Sidoarjo tentang Optimalisasi serapan anggaran dana desa untuk stabilitas ekonomi desa dan peran sosial mayarakat dalam penanganan Covid-19, pada Sabtu (13/03/2021).

Sebelumnya, Anis menjelaskan bahwa berdasarkan Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

"Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat," pungkas Anis.

Anis menambahkan bahwa berdasarkan Paparan Menteri Keuangan dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, pada 27 Januari 2021, dijelaskan realisasi transfer dana desa pada tahun 2020 mencapai 99,9 persen dengan nilai Rp71,10 Triliun dari alokasi Rp71,19 Triliun.

"Tercatat sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, Pemerintah telah menyalurkan total dana desa sebesar Rp327,60 Triliun. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya jumlah desa mandiri dari sebelumnya sebanyak 845 desa pada tahun 2019, menjadi 1741 desa mandiri pada tahun 2020," katanya.

Walau demikian, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa PKS tetap memiliki catatan sebagai masukan. Pertama, per tanggal 15 Desember 2020 lalu, Dana Desa baru mencapai serapan 66,4%. Artinya, dalam waktu 2 pekan, tersisa Rp23,9 triliun atau 33,6% yang harus digunakan.

"Lambatnya penggunaan Dana Desa ini karena bingungnya para Kepala Desa terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang sudah diubah sebanyak 3 kali, begitu juga Permendesa No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. "Oleh karena itu, sebaiknya peraturannya jangan terlalu sering direvisi," tandasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Wakil Ketua BAKN DPR RI

> "Lambatnya penggunaan Dana Desa ini karena bingungnya para Kepala Desa terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang sudah diubah sebanyak 3 kali, begitu juga Permendesa No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Oleh karena itu, sebaiknya peraturannya jangan terlalu sering direvisi"

#RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan
Sabtu, pukul 10.00 WIB
hanya di:
youtube **PKSTV DPR RI**

HNW: Setelah Revisi Draft Peta Jalan Pendidikan, Mendikbud Harusnya Revisi SKB Seragam Sekolah

KUTIPAN

Jakarta (13/03) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang mendengarkan kritik dan saran publik dan menyatakan sepakat untuk merevisi Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dengan memasukkan frasa "Agama".

Tapi karenanya, HNW berharap sikap akomodatif atas kritikan tersebut diterapkan juga terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Seragam Sekolah berbasis keagamaan, yang juga dikritisi oleh banyak pihak karena alasan yang sejenis; ketidaksesuaian dengan konstitusi.

"Sikap Mendikbud untuk merevisi draft Peta Jalan Pendidikan bermasalah itu merupakan langkah yang benar, dan sudah seharusnya dilakukan, mengingat banyaknya kritikan yang disampaikan oleh sejumlah elemen bangsa peduli Pendidikan Nasional seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Nahdlatul Ulama (NU), juga oleh Partai Politik seperti PKS dan PPP. Apalagi kritik terhadap draft ini juga sudah disampaikan oleh Komisi X DPRRI, mitra kerja Kemendikbud, sejak Januari 2021. Sayangnya tidak mendapatkan respons positif yang cepat dari Kemendikbud," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (12/03).

HNW sapaan akrabnya mengingatkan Mendikbud Nadiem yang sempat berkilah bahwa kata 'agama' tidak eksplisit dimasukkan, karena sudah diakomodir dengan ketentuan tentang Pelajar Pancasila yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Menurut HNW, itu tidak cukup untuk menggantikan konstitusionalisasi penyebutan frasa 'Agama' sejak dalam draft. Karena Pasal 31 ayat (5) UUDNRI 1945 maupun Pasal 1 angka 2 UU Sistem Pendidikan Nasional pun, secara eksplisit menyebutkan Agama, dikaitkan dengan Pendidikan Nasional, selain penyebutan frasa Budaya. Dan kesalahpahaman berpikir ini yang agaknya menjadi pangkal dari berbagai kebijakannya yang seakan kerap alergi dengan penyebutan Agama.

"Bila merujuk pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 memang hanya disebutkan iman, takwa dan akhlak mulia. Tapi, jangan lupa, Pasal 31 ayat (5) menyebutkan agama secara eksplisit. Demikian juga UU no 20/2003 Pasal 1 angka 2 malah secara eksplisit lebih dahulu menyebut Agama sebelum menyebut Budaya dikaitkan dengan Pendidikan Nasional. Jadi tidak perlu berkilah bahwa di draft Peta Jalan Pendidikan Nasional tersebut Agama sudah disebut secara implisit," jelasnya.

Apalagi, lanjut HNW, UUD NRI 1945 maupun UU Sisdiknas yang menjadi rujukan Peta Jalan itu juga sangat jelas menyebutkan frasa Agama tidak hanya secara implisit, tetapi juga eksplisit di kedua pasal tersebut. Nah, karenanya kalau rujukan Konstitusionalnya (UUD dan UU) tidak hanya menyebutkan frasa Budaya secara eksplisit dikaitkan dengan Pendidikan,

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Sudah sepatutnya jika SKB Tiga Menteri yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UUDNRI soal pendidikan yang meningkatkan keimanan ketakwaan dan akhlak mulia, serta tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) soal negara yang menjamin masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, termasuk dalam hal berpakaian, agar SKB itu juga segera direvisi"

You Stay At Home,
We Stay At Parliament
DPR - RI
PKS

Anggota FPKS Minta Kementan Lakukan Evaluasi terhadap Alsintan Brigade

KUTIPAN

Jakarta (15/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan evaluasi terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Dinas Pertanian di daerah-daerah.

"Lakukan evaluasi terhadap alsintan brigade," ucap Hermanto.

Menurutnya, bagi daerah yang berhasil mengelola alsintan brigade dengan baik maka lanjutkan program tersebut.

"Sebaliknya bagi daerah yang tidak berhasil mengelola, apalagi tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan alsintan, maka pertimbangkan untuk dilakukan moratorium bantuan alsintan brigade," tutur legislator FPKS DPR ini.

Dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan (dapil), Hermanto menyempatkan diri meninjau alsintan brigade di Kabupaten Solok yang disimpan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Gunung Talang.

"Kunjungan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pusat yang dikelola oleh daerah," ujar Hermanto.

Dalam kunjungan tersebut, Hermanto mendapati alsintan yang 'mangkrak' karena rusak dan belum diperbaiki. Sebaliknya, ditemukan juga banyak alsintan bantuan tahun 2016 dan 2017 dalam kondisi masih baru, tidak ada tanda-tanda pernah dipakai. "Fakta ini mesti mendapat perhatian pusat," tandasnya.

"Realisasikan segera program bengkel alsintan guna membantu daerah-daerah dalam menangani alsintan-alsintan yang rusak," tambahnya.

Adapun terhadap alsintan yang tersimpan bertahun-tahun di gudang dinas dalam kondisi masih baru, kata Hermanto, perlu dicari penyebabnya.

"Jangan-jangan pihak pusat membuat aturan penggunaan alsintan brigade ini terlalu ketat yang membuat dinas tidak mudah meminjamkannya ke petani," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Bagi daerah yang berhasil mengelola alsintan brigade dengan baik maka lanjutkan program tersebut. "Sebaliknya bagi daerah yang tidak berhasil mengelola, apalagi tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan alsintan, maka pertimbangkan untuk dilakukan moratorium bantuan alsintan brigade,"

Hadiri Agenda Dapil, Rofik Kunjungi Budidaya Ikan Lele Bantuan SKK Migas

KUTIPAN

Kebumen (15/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat meninjau budidaya ikan lele Relawan Indonesia (Relindo) di Desa Adikarso Kecamatan/Kabupaten Kebumen, Minggu (14/03/2021).

Sebab, kata Rofik, bantuan untuk budidaya ikan lele yang beberapa bulan lalu diterima dari SKK Migas melalui Rofik Hananto selaku anggota Komisi VII DPR RI sebagai salah satu upaya penggangulangan covid-19 telah dipanen dan menghasilkan keuntungan yang lumayan.

"Bantuan SKK Migas ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengatasi penaggulangan dampak Covid-19. Kami berharap program ini bisa terus berkembang dan berdaya. Dari 8 kolam di titik ini nantinya bisa berkembang menjadi 12, 15, 20, 30 kolam," kata Rofik.

Dari bantuan yang diberikan, Relindo mampu membuat membuat total 14 kolam ikan lele, yang tersebar di bebarapa titik budidaya ikan lele.

Rofik menambahkan, semua yang melihat keberhasilan ini tentu akan ikut bahagia. Karenanya perlu bimbingan dari semua pihak agar bisa terus ditingkatkan..

"Perlu ini ditulis dan dipasang tulisan Pusat Lele Kabupaten Kebumen sehingga orang jadi tahu di sini pusat lele. Dan orang akan ikut memviral-kan. Sekarang jamannya medsos, kita kenalkan usaha kita kepada masyarakat dengan kreativitas," katanya.

Rofik berharap dihitung betul keuntungan dari budidaya ikan ini. Harus ada profit untuk pengelola dan masyarakat.

"Salah satu tolok ukur keberhasilan pemberdayaan itu adalah adanya penghasilan bersih dari usaha," kata aleg dari Dapil VII Jawa Tengah itu.

Menurut Rofik, perlu dihitung net profit income yang dikurangi modal seperti untuk membeli terpal, pemeliharaan ikan, pembelian pakan. Setelah output bagus yang menghasilkan keuntungan maka outcome nya juga harus bagus.

"Perlu ada nilai kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Orang jadi ikut bergairah kerja. Dalam Islam kalau kita berbuat baik dan memberi nilai manfaat maka akan menjadi amal jariyah. Karena orang lain terinspirasi kita," kata Rofik.

Dia berharap, usaha budidaya ikan ini tidak hanya bertahan tetapi berkembang dan memberikan output bagus, outcome yang menarik dan outcome nya bisa kemana-mana.

"Apa yang dikelola di sini akan menjadi laporan ke SKK Migas bahwa bantuan yang diberikan sudah berhasil dikembangkan di sini." ujar aleg asal Kabupaten Purbalingga itu.

Rustedi dari Relindo Kabupaten Kebumen yang mengembangkan budidaya lele itu menuturkan, dia mencari informasi pengelolaan dari internet dan studi banding ke kelompok petani ikan.

"Alhamdulillah Panen perdana dilakukan di bulan Maret ini dan menghasilkan 84,5 kg atau sekitar 1.142 ekor lele," jelas Rustedi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

> "Perlu dihitung net profit income yang dikurangi modal seperti untuk membeli terpal, pemeliharaan ikan, pembelian pakan. Setelah output bagus yang menghasilkan keuntungan maka outcome nya juga harus bagus."

Kunjungi Masyarakat di Dapil

Netty: SDM Indonesia Harus Sehat dan Berdaya

KUTIPAN

Cirebon (15/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengawali kunjungan masyarakat dengan meresmikan Pesantren Mahasiswa Abdurrahman Bin Auf Tahfidz Institut pada Minggu (14/03/2020) di Cirebon.

Acara peresmian dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Anggota DPRD kab Cirebon F-PKS H. Ridwan, Camat Sumber, Lurah Kenanga, Koramil Sumber, dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam sambutannya Netty Prasetiyani menyampaikan bahwa ke depan tantangan zaman akan semakin berkembang.

"Kita dituntut untuk beradaptasi dan memiliki kompetensi yang dapat menjawab tantangan zaman hari ini dan masa depan yang terus berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang sehat dan berdaya. Pemerintah seharusnya memfasilitasi mewujudkan bukan menyerahkan kepada masyarakat" kata Netty dalam sambutannya.

Netty juga berharap para santri Ponpes Mahasiswa Abdurrahman Bin Auf dibekali dengan kombinasi nilai nasionalisme, entrepreneur dan nilai agama. Karena menurutnya dengan nilai dan prinsip inilah yang membedakan seorang santri dengan yang lainnya.

"Sudah seharusnya seorang santri memiliki karakter yang mencintai Indonesia, profesional serta menjunjung tinggi moralitas. Hal inilah yang harus menjadi pembeda dari seorang santri. Akan tetapi, tidak hanya menguasai ilmu dan hafal Al-Qur'an saja, namun santri juga harus berdaya ekonomi" terangnya.

"Berdaya secara ekonomi serta memiliki kompetensi akan membuat santri lebih bermanfaat lagi di lingkungannya. Sehingga kehadiran santri akan selalu dinanti oleh masyarakat sebagai problem solver atas masalah yang ada. Tentunya hal ini membutuhkan sokongan ekonomi serta kompetensi yang mumpuni" ungkapnya.

Pada hari yang sama, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga melakukan bakti sosial bersama dengan DPD PKS Kab Cirebon di Sumber, Kabupaten Cirebon. Netty Prasetiyani juga ditemani oleh Aleg DPRD Kab Cirebon Nova Fikrotusshofiyah yang sekaligus Ketua Bidang Kesos DPD PKS Kab Cirebon.

Acara baksos diisi dengan pembukaan layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan untuk masyarakat Sumber dan sekitarnya.

Netty mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelayanan PKS agar rakyat sehat dan berdaya. Masyarakat bisa mendapatkan manfaat pelayanan PKS kapan saja.

Pada kesempatan ini dilakukan juga pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat.

"Upaya ini sebagai langkah preventif dan edukatif bagi masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya. Mengingat di Indonesia cukup banyak penderita diabetes, jantung, kanker dan penyakit berbahaya lainnya, " lanjut Ketua DPP PKS ini.

"Selain layanan kesehatan, PKS akan terus mengembangkan bentuk pelayanan masyarakat dan advokasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Tunggu gebrakannya" kata Netty mengakhiri.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

> "Sudah seharusnya seorang santri memiliki karakter yang mencintai Indonesia, profesional serta menjunjung tinggi moralitas. Hal inilah yang harus menjadi pembeda dari seorang santri. Akan tetapi, tidak hanya menguasai ilmu dan hafal Al-Qur'an saja, namun santri juga harus berdaya ekonomi"

Sakinah Aljufri Silaturahmi dan Sumbangkan Alat Hadrah ke Abnaul Khairaat

KUTIPAN

Parigi (09/03) --- Anggota FPKS Sakinah Aljufri, bersilaturahmi dengan pengurus Abnaul Khairaat Parigi. Dalam kegiatan ini Sakinah juga memberikan bantuan berupa alat hadrah ke Abnaul Khairaat Parigi beberapa waktu silam.

Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Sakinah di kantor DPD PKS Kab. Parigi dan di dampingi oleh ketua dan pengurus DPD PKS Parigi.

Politikus perempuan asal Sulawesi Tengah ini mengatakan selain untuk memenuhi aspirasi masyarakat, pemberian sumbangan peralatan hadrah sering diberikan untuk majelis-majelis taklim di Sulteng.

"Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan Abnaul Khairaat. Oleh-oleh yang kami bawa saat ini adalah peralatan hadrah, semoga bantuan ini bermanfaat bagi Abnaul Khairaat dan bagi umat muslim secara luas," tutur Sakinah

Legislator PKS Dapil Sulawesi Tengah ini mengatakan generasi muda muslim harus terus menjaga dan mengembangkan kesenian bernuansa religi.

"Generasi pemuda muslim harus terus menjaga dan mengembangkan kesenian bernuansa religi seperti hadrah ini. Hadrah merupakan kesenian islam yang didalamnya berisi shalawat, puji-pujian, oleh karenanya kesenian ini harus dijaga kelestariannya oleh generasi muda muslim,"

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Selain untuk memenuhi aspirasi masyarakat, pemberian sumbangan peralatan hadrah sering diberikan untuk majelis-majelis taklim di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan Abnaul Khairaat. Oleh-oleh yang kami bawa saat ini adalah peralatan hadrah, semoga bantuan ini bermanfaat bagi Abnaul Khairaat dan bagi umat muslim secara luas,

Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan
Fraksi PKS DPR RI
fraksipksdprri
@fpksdprri
fraksi.pks.id

Rofik Hananto Ajak Pelajar Muhammadiyah Berkontribusi Membangun Negeri

KUTIPAN

Purbalingga (14/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mengajak para pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) untuk berkontribusi membangun negeri.

"Ada 2 hal yang menjadi narasi Muhammadiyah untuk membangun negeri. Yakni Islam yang seimbang dan Islam yang berkemajuan. 2 hal ini akan menjadi penegaknya diantaranya teman-teman IPM. Bagaimana generasi ini bisa berkontribusi di negeri ini," kata Rofik.

Rofik mengatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam Webinar Diskusi Semarak Pra Muktamar yang diadakan oleh PW IPM Jawa Tengah, Kamis (11/3) malam. Diskusi ini mengambil tema Moderasi Beragama, Peran IPM dalam Beragama yang Mencerahkan.

"Bicara masalah moderasi beragama, sebenarnya hal ini sudah ada pada awal kebangkitan Islam di abad 14 H. Islam adalah agama yang meletakkan posisi agama membumi dan melangit. Artinya, tidak terlalu membumi dan tidak terlalu melangit namun di antara keduanya," katanya.

Anggota DPR RI Dapil Jateng VII itu menambahkan, umat Islam itu umat yang wasath, atau umat yang berada di tengah antara 2 ujung. Rasulullah telah memberi panduan bahwa sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan.

"Dalam Quran surat Al Baqarah disebutkan bahwa umat Islam adalah umat yang wasath atau umat pertengahan. Islam meletakkan wasath dalam kedermawanan, yakni antara boros dan kikir. Umat Islam tidak boleh boros dan tidak boleh kikir," ingat Aleg asal Kabupaten Purbalingga itu.

Dia mengatakan, Islam juga mengajarkan untuk berani, yakni di antara sembrono dan penakut. Islam mengajak umat untuk berfikir yang rasional yang seimbang dalam berinteraksi dan berperilaku.

Sebagai agama yang wasath, imbuhnya, Islam menentang terorisme dan liberalisme. Islam tidak terperangkap antara kelompok teroris dan liberal. Islam juga mendudukkan posisi kehidupan kita antara individual dan kolektif.

"Muhammadiyah kelihatan sekali dalam amal usahanya sangat menghargai nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai kolektif. Ada semangat individu yang dipadu dengan semangat kolektif dalam amal usahanya," tuturnya.

Rofik melanjutkan, Muhammadiyah menjadi gerakan yang bisa menerima perubahan dan bisa tetap tegak lurus. Bicara moderasi beragama adalah bicara Islam berkemajuan.

"Islam yang wasath akan memberi solusi atas persoalan yang ada. Anak-anak muda perlu mereformulasikan Islam wasath. Bagaimana kita tidak hanya tampil dengan agama yang ada tetapi juga menjadi inovator yang membawa kemaslahatan umat," pesannya.

Ketua Umum PW IPM Jawa Tengah Nurul Huda mengatakan, ke depan diharapkan lahir dari rahim IPM kader-kader keumatan dan kader kebangsaan. "Rofik Hananto menjadi kader kebangsaan dengan menjadi politisi," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

> “Islam yang wasath akan memberi solusi atas persoalan yang ada. Anak-anak muda perlu mereformulasikan Islam wasath. Bagaimana kita tidak hanya tampil dengan agama yang ada tetapi juga menjadi inovator yang membawa kemaslahatan umat”

Legislator PKS: Perlu Kerja Bersama untuk Atasi Masalah Perkawinan Anak

KUTIPAN

Jakarta (17/03) --- Keprihatinan akan melonjaknya angka perkawinan anak di masa pandemi menjadi salah satu tema talkshow yang diangkat Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Selasa (16/3).

Dalam talkshow tersebut Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS yang hadir sebagai salah seorang narasumber menyebutkan bahwa masalah perkawinan anak ini tidak dapat diatasi oleh satu dua pihak saja melainkan memerlukan 'kerja keroyokan' dari berbagai pemangku kepentingan.

"Kita tidak hanya bisa mengandalkan salah satu pihak misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, atau BKKBN saja, tapi perlu lintas kementerian dan lembaga agar gerak dari upaya meminimalisir kejadian perkawinan anak ini bisa lebih kuat dan cepat mencapai sasaran." ungkap Ledia.

Aleg Fraksi PKS ini menjelaskan, kalau hanya bergerak secara sektoral tentu anggaran dan cakupan tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga sangat terbatas. Padahal persoalan perkawinan anak ini sangat kompleks.

"Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu anggarannya sangat kecil, BKKBN juga kecil, tupoksi juga terbatas, sementara persoalan perkawinan anak ini melibatkan banyak faktor; ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, sehingga perlu kerja keroyokan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasinya." pungkasnya.

Sejak sebelum pandemi saja lanjut Ledia masalah ekonomi dan akibat pergaulan bebas sudah kerap didengar menjadi alasan yang banyak mengemuka dari kejadian perkawinan anak. Lantas di masa pandemi kejadian perkawinan anak melonjak hampir dua kali lipat, terlihat dari bertambahnya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama yang mencapai 34 ribu permohonan dibanding sekitar 23 ribu permohonan pada 2019.

"Selain ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk, tidak adanya aktivitas sekolah tatap muka juga ditengarai memberi kontribusi. Ada anak yang karena berbagai alasan jadi putus sekolah. Ada yang bekerja. Ada yang dinikahkan dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga. Ada pula yang karena anak jadi banyak waktu luang lalu justru menghabiskan waktu dengan pacaran sehingga terjadi kehamilan lantas dinikahkan dan banyak lagi." urai Ledia.

Persoalan kompleks ini jelas membutuhkan kerja sinergis dari berbagai pemangku kepentingan. Ledia menyebut bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BKKBN bisa terus menggaungkan sosialisasi dan pelatihan terkait mencegah dan menghindari perkawinan anak namun perlu bersinergi juga dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan serta Pemerintah Daerah.

"Kita perlu ingat bahwa Pemda itu adalah ujung tombak pemerintahan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat dan paling tahu dengan kondisi serta persoalan terkait sosiodemografi di wilayah masing-masing.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

"Pemerintah perlu ingat bahwa keluarga yang kuat dan berdaya adalah penopang masyarakat dan bangsa yang kuat dan berdaya juga di masa datang. Dan keluarga yang kuat dan berdaya ini niscaya akan jauh dari praktek-praktek perkawinan anak"

Terima Keluhan Honor Pendamping Bansos

PKS Akan Minta Mensos dan Mendagri Rapat Bersama

KUTIPAN

Jakarta (16/03) --- Fraksi PKS diwakili Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis menerima audiensi dari Koordinator Daerah (Korda) Program Bantuan Sosial (Bansos) Sembako se-Indonesia yang mengeluhkan keterlambatan pencairan honor selama tiga bulan dan hak-hak mendasar lainnya yang belum terpenuhi dalam agenda Hari Aspirasi Fraksi PKS DPR RI, Selasa (16/03).

Para pendamping bansos sembako tersebut meminta kepada Fraksi PKS supaya memperjuangkan kebutuhannya meliputi legalitas Korda sesuai anggaran yang tertulis pada standar negara untuk mendapatkan gaji berdasarkan medan yang diemban, nomenklatur Korda yang jelas dan lebih spesifik sesuai Standard Operating Procedure (SOP) agar tidak tumpang tindih, fasilitas BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan sebagai bentuk kehadiran negara, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) diluar insentif Rp. 3.280.000/bulan.

"Agak sulit berharap dana sharing daerah, memang ada arahan kepada daerah untuk sharing APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah –red), namun faktanya tidak semua daerah menganggarkan anggaran ini, Korda juga tidak pernah dapat biaya perjalanan dari dinas di daerah. KPM (Keluarga Penerima Manfaat –red) yang ditangani terus bertambah, program lain Korda handle, gaji malah nggak naik. Karena intinya adalah sampai sekarang tidak ada titik temu antara direktorat dan pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang kita hadapi, termasuk permintaan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan –red) mengenai SBM (Standar Biaya Masukan –red)," ungkap perwakilan Korda.

Selepas menyambut para aspirator, Iskan menerangkan bahwa Progam Keluarga Harapan (PKH) dimulai sejak era Menteri Sosial Habib Salim Segaf Al-Jufri dari PKS. Ia juga menyebut, di masa itu anggaran Kementerian Sosial baru Rp 7 triliun, saat ini sudah mendekati Rp 70 T.

"Artinya perjuangan kita di PKS di Kementerian Sosial itu luar biasa. Yang penerima PKH dulu cuma ada di sekitar 7 provinsi sebagai percobaan, sekarang sudah 10 juta penerimaannya. Belum lagi bantuan-bantuan lain. Itu membuktikan bahwa kementerian sosial dalam kondisi negara belum sejahtera dia adalah pengikat untuk mempertahankan NKRI," ujar Iskan.

Iskan menambahkan, hasil keputusan dari aspirasi yang telah diterima akan dirangkum dan disampaikan ke menteri. Ia juga menjelaskan, biasanya masukan dari PKS cepat ditindaklanjuti, tapi bukan berarti 100% akan berhasil. Karena pengguna anggaran ada di kementerian, dan yang memegang uang tersebut ada pada mereka.

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.
Dapil Sumatera Utara II

"DPR itu cepatnya mengadvokasi, menganggarkan, dan mengawasi, tetapi pengguna anggarannya tetap di kementerian, cairnya itu tetap dari sana.

"DPR itu cepatnya mengadvokasi, menganggarkan, dan mengawasi, tetapi pengguna anggarannya tetap di kementerian, cairnya itu tetap dari sana. Nanti bentuk kebijakan kita, minta Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri melakukan rapat kerja bersama supaya ada penegasan dari Mendagri untuk Gubernur-Bupati/Walikota untuk menganggarkan untuk kelancaran pelaksanaan fungsi sosial khususnya pendampingan bantuan-bantuan yang ada, karena yang dikirim oleh pusat udah nggak cukup, dan itu boleh." pungkas Iskan.

PKS

BIO GRAFIS

Yuk Kenali Aleg Kamu

MAHFUDZ ABDURRAHMAN

Profil

- Nama Lengkap
  H. Mahfudz Abdurrahman, S. Sos.
- Tempat, Tangal Lahir
  Jakarta, 18 Juni 1958
- Dapil
  Jawa Barat VI
  (Kota Depok, Kota Bekasi)

Pendidikan

- **SMAN 5,** Kota Jambi
- **Univ. Jayabaya &**
  Univ. Krisna Dwipayana
  di Jakarta, 1980-1990

Keluarga

- Istri : **Hj. Latifah Abdussomad**
- Anak : **7 Laki-Laki,**
  3 Peremuan

Riwayat Organisasi

- **Ketua Senat Mahasiswa Universitas Jayabaya**
- **Bendahara Ikatan Penulis Dan Wartawan Muda Islam**
- **Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Univ. Jayabaya**
- **Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)**
- **Ketua Bidang Peternakan HKTI**
- **Wakil Sekretaris Real Estate Indonesia**
- **Pendiri Yayasan Sosial Tabung Amanah Umat (TAMU) - Bekasi**
- **Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Barat**
- **Ketua Bidang Ekonomi DPW PKS Jawa Barat**

Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI FPKS,** 2014-2019
- **Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP),** 2014-2019
- **Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
- **Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Tinggi (DPTP) PKS**
- **Bendahara umum DPP PKS**
- **Anggota Majelis Syuro PKS**
- **Komisaris Utama PT. Tata Optima Prestisa (property)**
- **Ketua dewan pembina yayasan Iqro',** Kota Bekasi
- **Ketua Harian Yayasan Al-hassan Kota,** Bekasi
- **Penasihat Gerakan Moral Pelestari Silat Betawi,** Bekasi

Media Sosial

- : Mahfudz Abdurrahman
- : @MahfudzAbdurra1
- : @mahfudz.abdurrahman

Apps : Mahfudz Abdurrahman

Desain : Aditya Angga

fraksi.pks.id | Fraksi PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | PKS TV DPR RI

Bantu Negara Bangkit dari Pandemi,

PKS Adakan Gerakan Donor Darah dan Plasma Konvalesen

KUTIPAN

Jakarta (15/03) --- Dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan Gerakan Nasional Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe bakar Alhabsy mengatakan kegiatan Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen merupakan implementasi dari Instruksi Presiden PKS yang meminta agar kader melakukan donor darah dan plasma konvalesen untuk mensupport kebutuhan stok darah di PMI.

Agenda ini, lanjut pria yang akrab disapa Habib Aboe, dilaksanakan di tengah rangkaian Rakernas PKS serentak secara nasional. Untuk di Jakarta kegiatan dilaksanakan di DPP PKS.

"Alhamdulillah, acara ini dapat renspons yang sangat baik. Ada 52 orang yang mendaftar untuk mendonorkan darah dan ada 44 orang mendaftar untuk donor konvalesen," ungkap Habib Aboe.

Habib Aboe menambahkan, kegiatan Ini adalah ikhtiar kita untuk membantu bangsa ini bangkit dari pandemi, plasma darah Insha Allah akan bermanfaat untuk mereka yang sedang berjuang sembuh dari Covid-19.

"Kami terus mendorong anggota PKS yang menjadi penyintas Covid-19 untuk mendonorkan plasma. Insha Allah para kader PKS selalu siap, karena DNA kemanusiaan selalu ada pada diri kader PKS," jelas Anggota Komisi III DPR ini.

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Sekjen DPP PKS

“Agenda ini dilaksanakan di tengah rangkaian Rakernas PKS serentak secara nasional. Untuk di Jakarta kegiatan dilaksanakan di DPP PKS. Alhamdulillah, acara ini dapat renspons yang sangat baik. Ada 52 orang yang mendaftar untuk mendonorkan darah dan ada 44 orang mendaftar untuk donor konvalesen”

Kunjungi Kanal Resmi Fraksi PKS DPR RI

- Website fraksi.pks.id
- Instagram fraksipksdprri
- Twitter @fraksipksdprri
- Facebook Fraksi PKS DPR RI
- Youtube PKSTV DPR RI

Nantikan Setiap Pekan